

BAB II

SEJARAH KOSOVO

Sebuah aspek yang mencolok di dalam konflik Kosovo adalah sejauh mana kedua belah pihak memiliki persepsi yang berbeda di dalam memperjuangkan sejarahnya, yang terkadang memerlukan pikiran untuk kembali ke masa lalu yang lebih jauh, mengatasnamakan hak untuk mendapatkan kendali suatu wilayah dan membenarkan tindakan apapun demi menjaga kestabilan wilayah tersebut. Sebagai contoh, banyak orang Serbia mengklaim bahwa Kosovo merupakan tanah tempat kelahiran peradaban mereka. Namun etnis Albania bersikeras menolak klaim tersebut, bahwa mereka telah berada di tanah Kosovo jauh lebih lama daripada orang-orang Serbia dan hingga saat ini telah membentuk mayoritas di sana. Namun yang perlu dicatat bahwa ternyata banyak klaim historis yang tidak memiliki nilai nominal. Salah satu penyebabnya adalah bahwa di masing-masing pihak memiliki subyektifitas di dalam mengklaim versi sejarahnya. Hal

yang terkait adalah bahwa mereka tidak memiliki penjelasan yang logis untuk menjelaskan mengapa konflik itu dapat terjadi, atau memang benar sebagian besar dari mereka hanyalah dalih bagi para pemimpin politik mereka yang berusaha meningkatkan kekuatan dan kekayaan mereka. Akhirnya, argumen semacam itu terkadang membuat para peneliti yakin bahwa sejarah di wilayah ini merupakan sejarah 1 (satu) abad yang tiada hentinya. Meskipun memang terdapat banyak konflik di Kosovo perlu dicatat bahwa catatan sejarah terutama yang disukai oleh nasionalis terkadang merujuk kepada perubahan dan konflik diantara para pemimpin politik.

A. Latar Belakang Sejarah Kosovo

Proses *inhabiting* di wilayah Kosovo saat ini telah mengalami proses yang sangat panjang dan menarik. Terdapat dua kelompok etnis yang berbeda yang mendiami daerah tersebut, yaitu etnis Serbia dan Albania. kedua kelompok etnis ini memiliki intepretasi yang sangat berbeda tentang asal muasal mereka. Bagi Albania, mereka menganggap diri mereka keturunan kaum Illyria yang merupakan

pemukim asli balkan. Dari perspektif lain, orang Serbia dianggap berasal dari Slavia. Beberapa penulis sejawaran berpendapat bahwa orang-orang Serbia saat ini adalah keturunan pengembara Asia Tengah yang menyerbu Eropa bersama Suku Hun yang kemudian berpadu dengan penduduk Slavia (Binder, 2013). Lebih tepatnya Serbia dan suku Slavia lainnya bermigrasi ke Balkan, termasuk wilayah Kosovo di abad ke-6. Wilayah ini kemudian menjadi saksi dari pelbagai peristiwa kelompok etnis yang berlomba-lomba untuk menguasainya di abad-abad kemunduran kekaisaran Romawi (Huntley, 2004).

Pada abad ke 13, Kosovo menjadi bagian dari Kerajaan Serbia. Sebuah tonggak penting adalah Pertempuran Kosovo 1389 yang membuat wilayah tersebut menjadi bersejarah, dimana Raja Nemanja dari Serbia mengambil keuntungan dari melemahnya kekaisaran Romawi untuk merebut apa yang sekarang disebut Kosovo, dan wilayah lain (Behnke, 2007). Hingga di kemudian hari Kosovo menjadi pusat negara Serbia. Nemanja dan para penerusnya membangun banyak Gereja Orthodox Serbia dan biara, beberapa di antaranya tetap menjadi situs suci utama Serbia hingga hari ini. Di abad pertengahan Serbia mencapai puncak kekuasaannya di bawah Raja Stefan Dusan dari 1331-1355. Kerajaan Serbia mencakup seluruh Kosovo, Albania utara, Makedonia, dan beberapa wilayah Yunani (Vickers, 1998). Namun, kekuatan Kerajaan Serbia seketika menurun akibat adanya perang saudara di antara para penerus Stefan Dusan, hal itu yang kemudian dimanfaatkan oleh Kekaisaran Ottoman Turki untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan Serbia. Dalam Pertempuran Kosovo Polje pada tanggal 28 Juni 1389, pasukan Serbia yang dipimpin Pangeran Lazar dikalahkan oleh tentara yang dipimpin Turki (Judah, 1999). Peristiwa ini menyebabkan supremasi Ottoman untuk empat ratus tahun berikutnya yang telah ditanam ke dalam inti gerakan nasionalisme Serbia (Warrander & Knaus, 2010). Banyak rincian pertempuran yang masih belum jelas, namun beberapa sejarawan mengatakan bahwa sangat ada kemungkinan Serbia dan Kosovo selalu bertarung disetiap sisinya. Jatuhnya Kekaisaran Serbia di abad pertengahan (1458) memungkinkan bagi para penakluk Turki untuk mendapatkan wilayah baru dengan luas wilayah yang cukup besar untuk kepentingan kekaisaran. Manfaat paling

penting dari situasi ini bagi negara Turki adalah bahwa mereka dapat memiliki akses ke Sungai Danube dan dengan demikian mereka mampu menaklukkan jalur migrasi utama yang dapat ditemukan di pusat semenanjung Balkan (Muchinov, 2016). Tidak terlalu penting, bahwa dengan mengakuisisi wilayah-wilayah Serbia ini, daerah-daerah pegunungan yang besar kini dipegang oleh orang Turki di Balkan Barat dan Kosovo merupakan salah satu wilayah yang paling berharga di masa itu.

Pada pergantian abad ke-18, pasukan Habsburg atau secara umum dikenal sebagai pasukan dari kerajaan Austria (wangsa Habsburg) melakukan invasi ke kawasan Balkan (Michigan State University, 2018). Orang-orang Serbia tergabung ke dalam unit tersebut dan berujung kepada penaklukan Ottoman, namun rupanya kondisi tersebut hanya bersifat sementara setelah Ottoman berhasil menaklukkan kembali pasukan Habsburg dengan diikuti tewasnya Piccolomini, jenderal perang Habsburg. Pasukan Austria dirutekan melewati jalur di dekat Kacanik pada 2 Januari 1690 untuk menarik pasukannya dari wilayah Kosovo (Elsie, 2004). Akibatnya, Serbian Orthodox Patriarch Arsenije dan lebih dari 40,000 pengungsi meninggalkan Kosovo menuju Hongaria. Ekspedisi lain pasukan Austria terhadap Ottoman juga pernah dilakukan pada tahun 1737 dan berakhir dengan kegagalan, antara lain dalam Pertempuran Banja Luka pada 4 Agustus 1737, dimana pertempuran ini mengakibatkan gelombang pengungsi luar biasa bagi orang Serbia (Revolvy, 2018).

Para sejarawan Serbia mengklaim bahwa peralihan dari penduduk yang awalnya didominasi oleh etnis Serbia kemudian beralih sebagian besar kawasan diduduki oleh etnis Albania dimulai pada saat ini, ketika orang-orang Albania bermigrasi dari daerah-daerah pegunungan yang miskin di bagian Albania utara ke dataran Kosovo yang jauh lebih subur. Sejarawan lainnya mengatakan bahwa peralihan tersebut dimulai lebih awal dan terjadi secara bertahap. Sebagian besar etnis Albania di Kosovo beralih dari yang awalnya penganut Kristen menjadi Islam (meskipun sebagian besar minoritas Katolik Roma masih ada hingga sekarang). Banyaknya konversi agama yang dilakukan justru bukan karena semangat keagamaan itu sendiri, melainkan untuk menghindari pajak yang sangat tinggi dan

diskriminasi kebijakan yang dihadapi non-Muslim di masa Kekaisaran Ottoman (Deringil, 2012).

A.1 Kebangkitan Serbia dan Kosovo Pada Periode Modern

Permasalahan pertama terjadi di awal abad ke- 18 dan kira-kira sampai akhir abad ke-18 terdapat konflik permanen yang meliputi aspek ekonomi dan agama di dalam kekaisaran. Gerakan nasionalistik wilayah Eropa dari kekaisaran Ottoman dimulai pada tahun 1804 dengan adanya pemberontakan etnis Serbia. Dari periode ini dan seterusnya hubungan antara Turki Utsmani dan masyarakat Balkan seringkali diwarnai oleh konflik serius (Jelavich & Jelavich, 2012). Sebagai contoh pada awal abad ke-19, dimana terdapat ambisi yang kuat terhadap kedaulatan nasional muncul di dalam sejarah masyarakat Balkan. Tak dapat dipungkiri bahwa orang-orang Turki sangat pandai mengelola konflik etnis lokal. Hal itu tergambar pada periode ketika terdapat kerajaan yang kuat melawan mereka namun berakhir dengan kekalahan. Pada abad ke-19, Inggris, Russia, Prancis, dan beberapa gerakan perjuangan Bulgaria mampu mencapai beberapa tujuan mereka (Micallef, 2018). Mereka mampu membawa negara mereka sendiri, lebih atau kurang setidaknya *independent*. Namun hal itu berbeda dengan Bangsa Albania, mereka masih di dalam sebuah proses pembentukan, dan belum berhasil membawa perjuangan negaranya hingga di abad ke-19 (Obucina, 2011).

Pada periode ketiga Kekuasaan Turki di Kosovo, orang Albania tetap menjadi etnis yang dominan. Namun sayangnya tidak ada data yang valid untuk menunjukkan presentase tersebut. Dengan angka sensus di tahun 1895-1896, umat Islam mewakili 53% dari total populasi Kosovo. Pada paruh kedua abad ke-19 elit politik Turki mencoba untuk memecahkan masalah etnis dengan mengatur ulang wilayah secara administratif (Simsek, 2015). Pada tahun 1878 wilayah Eropa dari kekaisaran dibagi menjadi tujuh vilayet besar, salah satunya adalah Vilayet Kosovo dengan Pristina sebagai pusatnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ketika Kosovo muncul sebagai unit teritorial dan administrasi yang independen. Vilayet Kosovo terdiri dari area yang jauh lebih luas daripada wilayah Kosovo hari ini. Area sekarang ini termasuk ke dalam wilayah Makedonia dan juga termasuk kota Skopje.

Selain Kosovo ada tiga vilayet lainnya, diantaranya Janina, Manastir, dan Skodra- dengan jumlah yang cukup signifikan orang-orang Albania tinggal di sini (Christo, 2008). Dalam situasi yang menguntungkan ini orang-orang Albania bergabung dan pada 10 Juni 1878 mereka membawa Liga Prizren dengan maksud untuk menyatukan wilayah-wilayah Albania yang telah dihuni. Angkatan bersenjata dari Liga Prizren berniat merebut kekuasaan di Kosovo dan Skopje pada tahun 1881.

Pada bulan April 1881, Liga tersebut mengeluarkan sebuah Memorandum, yang mengangkat masalah penyatuan keempat Vilayet, yaitu Janina, Kosovo, Manastir dan Skodra – yang masing-masing wilayah dihuni oleh orang Albania (Perritt, 2010). Sebagai tanggapan, pemerintah Turki mengambil langkah tegas dengan mengirim 20.000 pasukan ke dalam Vilayet dimana Albania melakukan pemberontakan. Dalam waktu yang cukup singkat pasukan Turki berhasil merendahkan pemberontakan tersebut dan menduduki daerah-daerah Vilayet. Para pemimpin Liga tersebut kemudian diasingkan ke daerah-daerah terpencil kekaisaran (Gulyas & Csullog, 2014). Pada awal tahun 1900-an, tidak hanya gerakan Albania saja yang melakukan perlawanan terhadap Turki, namun juga Serbia dan Makedonia, yang ingin memperjuangkan wilayahnya. Gerakan nasional Serbia, Makedonia dan Albania memiliki klaim teritorial yang sama. Bahkan di daerah Vilayet Kosovo dan Manastir terjadi bentrokan serius antara angkatan bersenjata Turki dengan Albania, Serbia dan Makedonia. Pada musim semi tahun 1910, pemberontakan besar Albania terjadi di Kosovo. Para pemberontak menduduki Skopje pada bulan Agustus 1912 dan memaksa pemerintah Turki untuk memulai negosiasi dengan mereka. Kemudian pada 12 November 1912, Majelis Nasional Albania memproklamkan kemerdekaan Albania di Valona (Central Intelligence Agency, 2018).

Bersamaan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, anti-Liga Balkan Turki pada bulan Oktober 1912, Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria memulai perang Balkan 1 dengan menyerang Turki. Secara meyakinkan Pasukan Turki dapat dikalahkan dan hampir seluruh semenanjung Balkan dibebaskan dari pengaruh Ottoman (Lampe, 2000). Keempat negara anggota berhasil mengalahkan kekaisaran Turki hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu, dan pada bulan

April 1913 perjanjian perdamaian ditandatangani di London. Turki menyetujui untuk memberikan wilayah kekuasaannya di bagian Eropa, kecuali Istanbul dan Selat Bosphorus (Turkeysvar, 2018). Pasukan Serbia dan Montenegro merebut Kosovo dan sebagian dari apa yang sekarang disebut Albania. Pasca terjadinya perang Bulgaria merasakan ketidakpuasan di dalam pembagian wilayah kekuasaan, dimana keuntungan teritorialnya yang sangat kecil dalam konflik, sehingga pada tanggal 28 Juni 1913 kembali meletus Perang Balkan II. Dalam Perang Balkan II, pasukan Bulgaria melawan pasukan gabungan, yaitu Serbia, Rumania, Yunani-Turki (Global Security, 2018). Perang ini berakhir dengan Perjanjian damai di Bukares, yang ditandatangani pada bulan Agustus 1913 (Paschalidou, 2017).

Pasca Perang Balkan II, pengaturan perbatasan kembali lagi diatur ulang. Adanya pengaturan perbatasan baru rupanya mencerminkan adanya sistem dukungan dari kekuatan besar dan hubungan kekuasaan yang sebenarnya terjadi di masing-masing negara. Ketidakpastian afiliasi beberapa daerah menyebabkan konflik baru yang serius. Makedonia, Dobruja, Thracia, dan Kosovo merupakan wilayah-wilayah yang dipertanyakan pada masa itu. Wilayah bekas Vilayet Kosovo, terlepas dari fakta bahwa mayoritas penduduknya adalah Albania, dianeksasi ke Serbia, dan sebagian kecil ke Montenegro. Mengingat Russia turut ikut andil di dalam mendesak agar Kosovo tetap menjadi bagian dari Serbia. Sehingga wilayah Serbia bertambah menjadi dua kali lipat sebagai hasil dari keuntungan pasca Perang Balkan II (Woehrel, 2017)

Pada tanggal 28 Juni 1914, Pangeran Austria-Hungaria Franz Ferdinand dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia, Gavrilo Princip, di Sarajevo. Hal yang kemudian terjadi adalah Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia pada bulan Juli. Peristiwa ini meletuskan Perang Dunia I. Setelah memberikan perlawanan keras namun efektif selama lebih dari 1 tahun, tentara Serbia kemudian dengan mudah dikalahkan dengan aliansi terhadap Bulgaria (Paterson, 2014). Bukan tanpa alasan, gabungannya Bulgaria di dalam peperangan ini sebagai bentuk balasan dari kekalahannya di Perang Balkan II. Kekalahan ini membuat tentara Serbia menjadikan Kosovo sebagai pertahanan terakhir, akibatnya tentara serta

warga sipil Serbia mundur melintasi pegunungan Albania utara menuju Laut Adriatik. (Joseph, 2015)

A.2 Kosovo Sebagai Bagian dari Yugoslavia

Setelah kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungarian pada tahun 1918, Kosovo menjadi bagian dari Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia, yang diperintah oleh raja Serbia (History State Government, 2018). Sebagai salah satu aktor pemenang perang, dan satu-satunya orang di kerajaan yang memiliki wilayah tersendiri sebelum terjadinya perang, Serbia merasa memiliki wewenang untuk mendominasi negara baru, hal ini kemudian memicu kebencian dari negara lain (Reuters, 2008). Serbia melalui upayanya ingin membentuk sebuah peradaban Serbia di Kosovo. Rencana dilakukan dalam upaya untuk mengurangi dominasi Albania di wilayah Kosovo. Hingga akhirnya Raja Alexander mendeklarasikan kediktatorannya pada tahun 1929 dan berganti nama menjadi negara Yugoslavia (BBC, 2013). Pada bulan April 1939, sesaat sebelum pecahnya Perang Dunia II, Italia dibawah kepemimpinan Benito Mussolini berhasil menduduki Albania, termasuk wilayah Kosovo. Kemudian diikuti dengan pasukan Jerman menyerang Yugoslavia pada tanggal 6 April 1941 (Hehn, 2005)

Perlawanan militer Yugoslavia pada akhirnya runtuh hanya dalam waktu 10 hari. Sementara itu sebagian besar wilayah Kosovo dijadikan negara boneka Albania oleh rezim fasis Italia. Mayoritas orang Kosovo bersuka cita atas persatuan mereka dengan Albania. Sama halnya dengan daerah-daerah di Yugoslavia, Kosovo menjadi tempat pertempuran berdarah antara royalis Chetniks, Partisan Komunis, pasukan militer pendudukan Jerman-Italia, dan kelompok etnis Albania yang bersekutu dengan pasukan *Axis* (Djokic, 2001). Namun pada tahun 1943 rezim fasis runtuh seketika dan Italia menyerah terhadap pasukan sekutu. Momen tersebut segera dimanfaatkan partisipan Komunis dengan cara menghancurkan pemberontak-pemberontak Albania, yang tidak ingin Kosovo bergabung dengan apa yang mereka lihat sebagai dominasi komunis di Serbia. Setelah kemenangan tentara komunis Tito pada tahun 1945, Kosovo menjadi daerah otonom di bawah kendali Serbia dan menjadikannya salah satu dari dua provinsi otonom di Serbia,

republik terbesar daria yang terbaru, 6 Republik Sosialis Federal Yugoslavia (Perlez, 1999).

Tito kemudian mulai mengubah arah kebijakannya terhadap etnis Albania di Kosovo dari yang awalnya dipenuhi dengan penindasan menjadi konsiliasi. Namun, prosesnya tidak berjalan cukup lancar untuk beberapa etnis Albania. Pasalnya di tahun 1968, dalam demonstrasi di keseluruhan Kosovo, pemrotes etnis Albania menyerukan agar Kosovo diberi status republik di Yugoslavia agar mendapatkan persamaan akses dengan Serbia (Bytyçi, 2015). Demonstrasi yang semula damai kemudian berubah menjadi kekerasan, polisi dan pasukan tentara dikerahkan untuk menumpas mereka, pertempuran ini mengakibatkan jumlah korban jiwa berjatuhan. Yugoslavia mencoba mengadopsi konstitusi baru di tahun 1974, sebenarnya upaya ini dilakukan semenjak tahun 1966 dengan tujuan meningkatkan hak-hak Kosovo di dalam kesetaraannya terhadap Federasi Yugoslavia dengan Serbia (Pavlović, 2018). Walhasil muncul peran kaum intelek Albania yang berhasil mengambil alih posisi strategis di pemerintahan lokal maupun di dalam bisnis. Disamping itu Kosovo juga menerima anggaran subsidi yang cukup besar, rencana tersebut dilakukan sebagai bagian dari rencana federal untuk menyamaratakan perbedaan yang mencolok di dalam pembangunan antara yang kaya dan miskin di daerah Yugoslavia (Bhaumik & Yun, 2006)

Di seberang lain, masih banyak suara Kosovar menuntut pemisahan diri dari Serbia dan menginginkan status republik penuh di dalam Federasi Yugoslavia. Sebagai tambahan untuk mencapai representasi di dalam badan-badan federal dan kesetaraan yang sifatnya formal dengan Serbia. Status republik dinilai akan memberikan Kosovo hak, setidaknya secara teori, untuk melepaskan diri dari Yugoslavia. Beberapa dari mereka bahkan mengajukan persatuan wilayah dengan Albania, meskipun sebagian besar orang Kosovo mengakui bahwa mereka lebih bebas dan secara ekonomi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rekan-rekannya di Albania, yang menderita kemiskinan di bawah rezim komunis. Sementara rasa nasionalisme meningkat di antara etnis Albania, kebencian minoritas Serbia di Kosovo terhadap "Albanisasi" di Kosovo juga semakin meningkat. Tuduhan-tuduhan Serbia terhadap etnis Albania seperti diskriminasi, intimidasi, dan

kekerasan untuk mengusir orang-orang Serbia agar keluar dari daerah tersebut dan menciptakan Kosovo sebagai "etnis murni" telah terfragmentasi di dalam konflik ini.

A.3 Kosovo dan Runtuhnya Republik Federal Sosialis Yugoslavia

Setelah kematian Tito pada tahun 1980, sistem politik yang sangat terdesentralisasi yang dia letakkan di dalam republik federasi secara bertahap mulai pudar, dan ada semakin banyak perebutan kekuasaan di dalam elit politik Yugoslavia. Terlepas dari itu semua nasionalisme etnis Albania masih tetaplah kuat. Pada tahun 1981, protes mahasiswa terhadap kondisi yang buruk di Universitas Pristina meningkat menjadi kerusuhan. Para pengunjuk rasa di universitas dan di seluruh provinsi menyerukan status republik untuk Kosovo (Woehrel, 2017). Beberapa demonstran menyerukan persatuan dengan Albania. Peristiwa penting dalam perkembangan menuju konflik adalah pengangkatan Slobodan Milosevic, pertama sebagai ketua Partai Komunis Serbia pada tahun 1986, dan kemudian sebagai Presiden Serbia pada tahun 1989 (Telegraph, 2006). Di kemudian hari Milosevic segera memahami bahwa nasionalisme dapat digunakan sebagai senjata politik, hal itu dia tunjukkan dengan mengambil langkah-langkah (seperti penegasan kembali otoritas republik Serbia atas Kosovo) dan sentimen suara yang akan memanfaatkan dukungan massa orang Serbia (Wintrobe, 2002). Penindasan terhadap protes Albania oleh otoritas Serbia segera menyusul pembatasan otonomi Kosovo pada Maret 1989 dan mengakibatkan kematian lebih dari 60 orang Albania dan pemenjaraan ratusan aktivis Albania (HRW, 1991). Cohen meringkas kebijakan nasionalis Serbia kurang lebih seperti ini;

“In effect, Milosevic successfully exploited a backlash of Serbian nationalism in order to build a cross-regional alliance of ethnic Serbs unprecedented in Yugoslavaince the formation of Tito's World War II Partisan movement”
(Cohen, 1993)

Selain Montenegro, di mana lebih dari separuh warga menganggap dirinya sebagai seorang Serbia, reaksi di republik lain terkait dengan menguatnya kekuasaan Serbia di Belgrade dan tanggapan keras terhadap Albania merupakan bukti penguatan gerakan nasionalis Serbia. Hal ini dipicu ketika runtuhnya kekuatan komunisme di Eropa Timur pada tahun 1989-1990, dan langkah selanjutnya menuju pluralisme multi-partai dan pemilihan yang lebih kompetitif (Sunny, 2010). Selama tahun 1990, pemilihan multi-partai diadakan untuk pertama kalinya di Slovenia, Kroasia, Makedonia, Serbia dan Bosnia-Herzegovina. Pemilihan demokratis tersebut telah membangkitkan kekuatan politik kepada pemilih yang nasionalis (Thompson, 2000). Bahkan di dua wilayah yang paling independen dan maju secara ekonomi di Yugoslavia, Slovenia dan Kroasia (di mana Franjo Tudjman, Aliansi Demokrasi Kroasia Mengambil alih kekuasaan), intinya suasana sebagian besar di tahun 1990 bukanlah persoalan pemisahan diri. Kedua rezim tersebut hanya menolak struktur politik Yugoslavia yang dianggap sudah usang, tahapan ini bertujuan pada transformasi radikal sebuah negara menuju ke arah konfederasi yang lebih bebas dan berdaulat (Janez, 2000). Sebagai tanggapan, Serbia berpendapat bahwa prosedur untuk memisahkan diri pertamanya harus dirumuskan secara terperinci, dan hak-hak minoritas harus segera diselesaikan. Pada bulan Desember 1990, Parlemen Slovenia menyatakan bahwa jika kebebasan konfederasi tidak segera ditemukan solusinya, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan Slovenia secara sepihak akan memproklamkan kemerdekaannya. Presiden Kroasia, Tudjman, kemudian mengatakan Kroasia akan melakukan hal yang sama (Fish, 2018). Hambatan utama untuk maju ke dalam proses negosiasi antar republik-republik adalah 'permasalahn Serbia', pasalnya 25 persen orang Serbia di Yugoslavia hidup diluar Serbia. Milosevic kemudian menginginkan perombakan di dalam federasi, di mana dia menginginkan penduduk Serbia yang tersebar di wilayah untuk bersatu bersatu padu ke dalam satu negara, dan di mana orang Serbia akan memiliki pengaruh politik yang sepadan dengan posisi mereka sebagai kelompok etnis terbesar Yugoslavia (Kayongo, 2018). Kebijakan perombakan konfederasi yang diajukan Milosevic umumnya didukung oleh perwira dengan jabatan tinggi dan Tentara Rakyat Yugoslavia (JNA), dan

sebagian besar dari mereka adalah orang-orang Serbia atau Montenegro. Para perwira ini melihat diri mereka sebagai benteng terakhir Pan-Yugoslavisme dan kesatuan negara, hingga di kemudian hari mereka memandang pasukan nasionalis di Kroasia dan Slovenia sebagai musuh nomor satu Yugoslavia (Pavković, 2000).

Pada bulan pertama di tahun 1991, serangkaian pembicaraan diadakan antara para pemimpin yang mewakili keenam republik dan dua daerah otonom, namun upaya diplomasi tersebut tidak menemukan titik kesepakatan yang dicapai pada federasi yang lebih modern, yang mana akan mengakomodasi kepentingan Serbia, Kroasia & Slovenia. Semua pihak tidak mau berkompromi kecuali Makedonia dan Bosnia Herzegovina yang bekerja sama dalam upaya mencari jalan tengah di dalam debat federasi-konfederasi (Bennett, 2018). Presiden Bosnia Izetbegovic berpendapat bahwa eksistensi Yugoslavia di dalam beberapa aspek sangat penting bagi kelangsungan hidup Bosnia. Satu-satunya dukungan besar dalam pencarian kompromi oleh Makedonia dan Bosnia berasal dari perdana menteri Yugoslavia, Ante Markovic. Selama beberapa tahun Markovic telah mencoba untuk menyelamatkan krisis perekonomian Yugoslavia dengan keinginan kuatnya untuk melakukan program reformasi ekonomi, akan tetapi reformasi tersebut akan sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat internasional agar kebijakannya menjadi lebih efektif. Markovic sendiri beranggapan bahwa dengan melakukan reformasi ekonomi dirinya dapat mengubah kondisi politik di negaranya (Milekic, 2016).

Slovenia hampir selalu menjadi pelopor di dalam pemisahannya terhadap Yugoslavia, sehingga tindakan tersebut berfungsi sebagai referensi bagi Kroasia. Namun di dalam melihat tindakan yang dilakukan Slovenia, Tudjman memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan historis perjuangan Slovenia dan Kroasia (Anderson, 1995). Slovenia memiliki populasi etnis yang cenderung relatif homogen dengan hanya 2% etnis Serbia, sedangkan Kroasia 12% penduduknya beretnis Serbia (Hobbs, 2008). Dalam upayanya selama tahun 1990-1991 untuk memaksakan rezim militan Kroasia di wilayah kekuasaan Serbia, meliputi unit militer Kroasia dan pemecatan orang Serbia secara luas dari aspek publik dan privat di krajina, Tudjman tidak menganggap klaim legitimasi dan historis dari minoritas Serbia. Kebijakan ini kemudian menimbulkan rasa takut di kalangan orang-orang

Serbia tentang bangkitnya kembali Ustasha (Naimark, 2002). Apa yang telah dibutuhkan oleh Tudjman adalah memisahkan dirinya dan kelompok politiknya dari rezim fasis Perang Dunia II. Tanpa jaminan keamanan yang memadai yang diberikan kepada Kroasia terhadap Serbia, Milosevic yang berada di Beograd menginstruksikan orang-orang Serbia untuk mempersenjatai diri.

Pada tanggal 25 Juni 1991, Slovenia dan Kroasia secara sepihak menyatakan kemerdekaannya. Selama hampir 24 jam pasukan JNA dan angkatan pertahanan Slovenia terkunci ke dalam pertempuran sengit, dan paramiliter Kroasia-Serbia telah melancarkan serangan terhadap Kroasia (University of Cambridge; Research Centre for International Law, 1997). Konflik di Slovenia begitu singkat namun menentukan, dan berakhir dengan kegagalan JNA untuk mencapai tujuan mereka yaitu merebut perbatasan Slovenia. Tentunya hal ini telah dipersiapkan dengan baik oleh Slovenia sebelum terjadinya konflik, dan rupanya operasi JNA salah dikelola. Namun alasan yang paling mendasar terhadap kegagalan JNA adalah bahwa Milosevic telah menerima rencana pemisahan Slovenia satu bulan sebelumnya, dan beberapa militer JNA baru dikerahkan untuk operasi tersebut (Sell, 2003). Slovenia yang secara etnis bersifat homogen tentu tidak kesulitan di dalam usaha memproklamasikan kemerdekaannya, situasi ini berbeda dengan Kroasia ketika etnis mayoritasnya adalah orang-orang Serbia. Perang tersebut segera meyebar ke Kroasia dan kemudian ke Bosnia-Herzegovina. Perang di Kroasia sangatlah berbeda, dengan pasukan Kroasia-Serbia memainkan peran yang begitu besar, dan dalam intensitas lebih dari 10,000 korban jiwa dalam enam bulan pertempuran, terhitung dari bulan Juli hingga Desember (Vukic, 2000). JNA dan unit paramiliter Kroasia-Serbia sering bekerja sama dengan unit Paramiliter Serbia dengan tujuan untuk menciptakan daerah kantong untuk etnis mereka dan membersihkannya dari orang-orang Kroasia.

Selama bulan Juli hingga Agustus tahun 1991, kekerasan tidak begitu meningkat secara intensif selama perang sipil *de facto*, hanya saja yang terjadi adalah *skirmishing* di wilayah perbatasan (Croatia, 2018). Namun pertempuran kembali meningkat pada bulan September, dan ini dianggap sebagai pertempuran paling besar, akibatnya Serbia berhasil mengepung salah satu kota yang berada di

Kroasia, Vukovar (BBC, 2014). Kemudian dilanjutkan selama hampir 3 (tiga) bulan peperangan hingga beberapa kota hancur dan jatuh di bulan November. Permusuhan yang berlarut-larut di Kroasia mempercepat transformasi JNA dari yang semula berkekuatan multietnis menjadi militer yang dikuasai dan dijalankan oleh Serbia, meskipun di dalam beberapa kesempatan menentang Perdana Menteri Markovic, pemimpin-pemimpin militer tersebut tetap berada dibawah naungan Milosevic, pusat kekuasaan pemerintah yang sebenarnya di Yugoslavia. Di pihak lain Slovenia dan Kroasia terus mendesak untuk mendapatkan pengakuan internasional, terutama dari kelompok Masyarakat Internasional (Lobell & Mauceri, 2004). Sementara itu, Masyarakat Eropa membentuk suatu Komisi Arbitrasi untuk mengkaji kelayakan kedua negara tersebut. Pada tanggal 8 Oktober 1991 Sekjen PBB menunjuk Cyrus Vance (mantan menlu AS) sebagai utusan khusus PBB di bekas negara Federasi Yugoslavia untuk menyelesaikan konflik (Darnton, 2017)

Akhirnya, pada 15 Januari 1992, proposal perdamaian Vance telah diterima oleh Kroasia, serta oleh Beograd dan JNA, yang telah merebut banyak wilayah. Keputusannya adalah perlunya mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara yang sedang bertikai. Rencana Vance telah melibatkan 14.000 pasukan penjaga perdamaian PBB yang mulai datang pada 19 Maret (Charlesworth, 2017). Pada tanggal 23 November diadakan pertemuan di Jenewa yang hasilnya mencakup kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Pada tanggal 27 November Dewan Keamanan PBB akan mengeluarkan resolusi No 721, yang merintis jalan untuk pembentukan operasi penjaga perdamaian di Yugoslavia (NATO, 2018). Sebelum hasilnya diumumkan, pada tanggal 23 Desember 1991, secara mengejutkan Jerman menyatakan pengakuannya terhadap Kroasia dan Slovenia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Pengakuan Jerman itu yang lebih dulu dari hasil Arbitrasi Masyarakat Eropa telah mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk mengakui kedaulatan kedua negara tersebut (Zipfel, 1996). Bahkan pada tanggal 6 April 1992, beberapa kelompok negara Masyarakat Eropa dan Amerika Serikat memberikan pengakuannya atas kemerdekaan Republik Kroasia,

Slovenia, dan juga Bosnia Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas di wilayah tersebut.

Di seberang lain, kesepakatan itu bukanlah penyelesaian politik; konflik tersebut tidak terselesaikan, hanya membeku hingga solusi yang tepat ditemukan. Walaupun Kroasia suda memisahkan diri dari Yugoslavia, namun rupanya belum menyelesaikan permasalahan yang di hadapi negara tersebut. Sebab di wilayah perbatasannya bermukim etnis Serbia Krajinia yang merupakan mayoritas di wilayah Krajinia dan masih di dalam perbatasan administrasi Republik Kroasia. Para pemimpin komunitas Serbia di Krajinia merasa dikhianati oleh keputusan yang menghentikan perselisihan, namun Milosevic melihat pengerahan pasukan PBB sebagai mekanisme untuk mengkonsolidasikan keuntungan militernya di Kroasia (Anderson, 1995). Hingga pada akhirnya mereka memisahkan diri dari Kroasia dan bergabung dengan Republik Yugoslavia yang notabene adalah bagian dari Serbia Raya. Hal ini juga merupakan hasil kerja sama antara mereka dengan pemimpin Yugoslavia yang berasal dari Serbia (Slbodan Milosevic). Permasalahan ini akhirnya memberikan jalan kepada PBB untuk menjadikan wilayah Krajinia sebagai wilayah netral. Meskipun perselisihan sempat mereda untuk beberapa waktu, akan tetapi konflik mengenai wilayah maupun perbatasan terus berlanjut. Dengan melihat ke belakang, hal ini dapat dilihat sebagai ketidakberuntungan bahwa kerangka acuan Vance tidak diperluas untuk menghadapi krisis yang membayangi di negara tetangga, yaitu Bosnia.

Melihat situasi dan kondisi politik yang semakin tidak menentu, pada tanggal 27 April 1992 telah diproklamkan Republik Yugoslavia yang anggotanya terdiri dari Republik Serbia dan Republik Montenegro yang mencakup wilayah perbatasan kedua negara (Princeton, 2018). Hasil dari deklarasi Yugoslavia yang baru tersebut, secara de facto dan de jure telah menjadikan Republik-Republik, seperti Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia buan lagi bagian anggota negara Federasi Yugoslavia yang baru. Dengan demikian Republik Federasi Sosialis Yugoslavia menjadi bubar dan tidak ada lagu pada tanggal 28 April 1992. Pihak PBB, Masyarakat Eropa, termasuk Eropa lantasi menolak untuk mengakui berdirinya federasi tersebut. Hal ini ini disebabkan karena masih berlangsungnya

perang di wilayah tersebut, yang menghalangi kesepakatan tentang pengaturan aset dan hutang federal, termasuk utang nasional (CIA, 2018). Terlebih gabungan dua negara ini mendapatkan sanksi dari sejumlah lembaga internasional karena aksi brutalnya dalam perang tersebut. Dalam dekade tersebut, perang antar etnis masih tetap berlangsung di sebagian wilayah balkan. Sebagai contoh pada tahun 1993 dimana pemerintahan Muslim Bosnia dikepung oleh pasukan Bosnia-Serbia di ibukota Sarajevo (Reuters, 2008). Di Bosnia tengah kabanyakan tentara Islam berperang secara terpisah melawan Kroasia-Bosnia yang ingin menjadikan Bosnia bagian dari Kroasia yang lebih besar. Kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB dianggap tidak efektif di dalam mengendalikan konflik. Perang berlangsung sengit mengingat terdapat perbedaan etnis dan sejarah antara bangsa Bosnia dan Serbia.

Pada masa itu Diplomat dari Inggris, Lord Carrington turut membantu menyelesaikan konflik permasalahan di Yugoslavia. Usaha mencari jalan menuju perdamaian di dala konflik Balkan terus dilakukan. Pada tanggal 1 November 1995, diadakan perundingan perdamaian di Dayton, Amerika Serikat. Perundingan Dayton dihadiri oleh Presiden Serbia Slobodan Milosevich, Presiden Bosnia Alija Izetbegovich dan presiden Kroasia Stipe Mesic (Alkatiri, 2016). Perundingan ini diprakarsai oleh NATO dan Amerika Serikat dengan tujuan merumuskan perjanjian perdamaian yang sifatna menyeluruh di Bosnia-Herzegovina. Perundingan berlangsung selama beberapa hari, dan berakhir ditandatanganinya perjanjian perdamaian oleh ketiga utusan etnis berbeda tersebut. Perundingan tersebut berisi perjanjian perdamaian mengenai Bosnia-Herzegovina dengan membagi wilayah bekas Yugoslavia itu sesuai dengan garis etnis. Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 21 Noember 1995 di Paris, Perancis. Yang memutuskan dua entitas yang memerintah di wiilayah Bosnia lama yaitu, etnis Muslim Bosnia (Bosnjak) Herzegovina yang membentuk negara Republik Bosnia-Herzegovina serta etnis Serbia Kroasia yang membentuk Republik Srpska (East & Pontin, 2016).

B. Latar Belakang Konflik Kosovo

Pada tahun 1989-1990 Yugoslavia merupakan salah satu negara di Eropa Timur yang berani melawan tren revolusi demokratik. Republik Federal Sosialis

Yugoslavia dan rezim komunisme masih tetap berdiri kokoh. Namun, kekuatan yang menyebabkan disintegrasi Yugoslavia walau bagaimanapun meningkat secara signifikan. Di Serbia dan Kroasia khususnya, nasionalisme telah menggantikan komunisme sebagai ideologi utama yang sah (Maldini, 2012). Pada akhir tahun 1990-an, Republik Federal Sosialis Yugoslavia sudah tidak ada lagi. Wilayah tersebut telah mengalami peperangan, diantaranya Slovenia, Kroasia, dan Bosnia. Rupanya fenomena nasionalisme etnis merupakan kekuatan politik yang dominan di seluruh Balkan. Perang, kriminalitas dan korupsi mengakibatkan beberapa kerusakan pada struktur ekonomi, dan konflik keempat, dengan potensi menyeret negara-negara tetangga, yaitu Kosovo (Zgaga, 2014).

Ketidakkampuan negosiator Dayton untuk menempatkan proses perdamaian di Bosnia dalam kerangka strategis untuk kawasan secara keseluruhan terbukti menjadi kegagalan besar. Fragmentasi Yugoslavia belum berjalan dengan baik, dengan tidak adanya penyelesaian secara komprehensif dan tantangan baru terhadap status quo pasti akan muncul. Salah satu dari tantangan ini, menyusul dengan diluncurkannya kesepakatan Dayton di Provinsi Kosovo di Serbia, setelah beberapa tahun ketegangan memuncak di dalam perang Balkan keempat. Di bawah Konstitusi 1974 dari bekas Republik Sosialis Yugoslavia, terjadi devolusi kekuasaan yang signifikan, menggeser otoritas dari pemerintah pusat di Beograd kepada enam konstituen republik negara tersebut (Guzina, 2000). Di Serbia, Kosovo diberi otonomi substansial, termasuk pengawasan sistem pendidikannya, peradilan, dan polisi. Bahasa Albania menjadi bahasa resmi provinsi ini. Kosovo juga diberi majelis provinsi sendiri. Sebelum krisis Kosovo, populasi Kosovo adalah antara 1,8 juta hingga 2,1 juta, di mana sekitar delapan puluh lima hingga sembilan puluh persen adalah orang Albania-Kosovo (Batkovski, 2000).

Pada tahun tahun 1986 kita dapat melihat kebangkitan Milosevic sebagai kepala Liga Komunis Serbia, sementara 1987 menandai dirinya telah menguasai keseluruhan negara Serbia. Kenaikan Milosevic dan penghapusan para pemimpin politik lainnya dari era Tito tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa kepala negara Serbia yang baru ini akan sepenuhnya mengubah kebijakan sebelumnya terkait otonomi Kosovo, dan bahkan nasib Yugoslavia. Milosevic menuduh rezim Tito

bersikap anti-Serbia (Jović, 2009). Menurutnya, "Tito membagi Serbia menjadi tiga bagian" (Serbia, Kosovo dan Vojvodina). Persepsi kritis ini merupakan kebencian dari masa lalu, bersamaan dengan persepsi yang diciptakan dari apa yang disebut "genosida Albania melawan Serbia di Kosovo", menyebabkan perubahan radikal kebijakan terhadap Albania di Beograd di bekas Yugoslavia. Dengan kekuasaannya, Milosevic bersumpah untuk mengembalikan aturan dan kedaulatan Serbia di Kosovo. Pada bulan April 1987, Slobodan Milosevic, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Presidium Komite Sentral Liga Komunis Serbia, melakukan perjalanan ke Kosovo. Pada kunjungannya ke Kosovo pada tahun 1987, setelah mendapatkan kepemimpinan di Liga Komunis dan negara Serbia, Milosevic mengatakan;

“No one will dare to strike you any longer,” patronizing the Kosovo Serbs, who had been allegedly complaining to him about “enduring the persecution of Albanians.” He further added “Yugoslavia could not exist without Kosovo. Yugoslavia and Serbia will not give Kosovo away.” (Bytyci, 2015)

Pada 28 Juni 1989, dalam pidato di depan kerumunan lebih dari satu juta orang Serbia lokal, pada peringatan 600 tahun Pertempuran Ottoman-Serbia di Kosovo, Milosevic mengemukakan agenda nasionalis Serbia untuk Kosovo (Sellis, 2000). Beberapa krisis telah diprediksi secara lebih konsisten daripada pecahnya konflik di Kosovo selama musim dingin tahun 1997-1998. Milošević telah memulai proses yang mengarah pada disintegrasi federasi Yugoslavia dengan menghapuskan otonomi Kosovo pada 1989 dan menjadikan mayoritas Kosovo Albania menjadi penduduk yang tidak berdaulat (Zimmermann, 1998). Pada akhir tahun 1989, retorika anti-Kosovo dari Beograd mencapai puncak yang baru. Beograd kemudian mengejar serangkaian kebijakan yang keras dan represif di Kosovo sambil mempertegas bahwa kami tidak akan pernah "menyerah" terhadap provinsi ini yang sebagian besar dihuni oleh etnis Albania. Kebijakan represif terus berlanjut seperti tindakan pemecatan puluhan ribu pekerja etnis Albania dari segala profesi, pengendalian sistem pendidikan terpadu yang tidak menyertakan pelajaran bahasa

Albania di luar sekolah dasar, dan penutupan Universitas Pristina yang didominasi oleh etnis Albania serta media massa dengan bahasa Albania. Elit politik Albania digantikan oleh pendukung Milosevic. Organisasi politik Albania serta asosiasi budaya dan olahraga dilarang. Undang-undang yang baru disahkan di tahun yang sama, membuatnya menjadi kejahatan bagi etnis Albania di Kosovo untuk membeli atau menjual properti tanpa melalui izin dari Beograd. Tahun 1990-an Kosovo dalam iklim politik 'apartheid' (Bekaj, 2010).

Untuk mengorganisir populasi Albania akhirnya didirikan Liga Demokratis Kosovo (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK). Dalam kondisi yang penuh kerahasiaan dan dibawah tekanan dari polisi dan mekanisme keamanan lainnya, pada 2 Juli, 1990, majelis Kosovo menyetujui deklarasi konstitusi yang nantinya akan membuka jalan untuk menegaskan status kesetaraan Kosovo dan dengan republik Yugoslavia lainnya. Pada tanggal 7 September di tahun yang sama, sidang dilaksanakan di kota Kaçanik, dan hasilnya adalah persetujuan terhadap konstitusi dan menyatakan Kosovo sebagai sebuah republik (Rogel, 2003). Pada bulan September 1991, sebuah referendum untuk kemerdekaan Kosovo diselenggarakan, dengan jumlah pemilih 87% orang Albania, dari 99% mereka mendukung. Pada bulan April 1992, pemilihan multi-partai pertama diadakan, yang mana bertujuan untuk mengkonfirmasi kepercayaan orang-orang terhadap program perlawanan politik LDK, yang dipimpin oleh Dr. Ibrahim Rugova (Clark, 2000). Tindakan politik yang dilakukan LDK tidak diakui atau divalidasi oleh Serbia maupun oleh komunitas internasional. Namun, mereka menyediakan platform hukum (meskipun secara sepihak diakui) dan legitimasi untuk mewakili mayoritas penduduk Kosovo. Pemerintahan yang dijalankan LDK memimpin jalan dalam mengantar Kosovo ke dalam keberadaan paralel, membangun sistem perawatan kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan mereka sendiri. Sumbangan keuangan dari diaspora Albania juga memainkan peran penting dalam mempertahankan sistem paralel ini (Dimou, 2009).

Pasca deklarasi rezim Beograd mengintensifkan metode represifnya. Kekerasan yang dilakukan polisi maupun militer yang diprakarsai oleh Beograd menjadi hal yang lumrah di Kosovo, termasuk penangkapan sewenang-wenang,

penyiksaan kustodian, dan penolakan serta pelanggaran hak-hak orang Kosovo Albania. Pengadilan politik merupakan hal yang lazim, di mana para petugas polisi etnis Albania diadili dan dijatuhi hukuman penjara. Hal ini mengakibatkan orang Albania-Kosovo hidup di dalam “kesunyian bawah tanah”. Kebijakan Beograd yang semakin menindas Kosovo dan orang-orang Kosovo-Albania tidak luput dari perhatian. Sejak awal pengamat memperkirakan bahwa aksi Belgrade di Kosovo akan berkembang menjadi perang habis-habisan.

B.1 Pembentukan dan Aktivitas KLA

Pada paruh pertama tahun 1990-an, banyak kelompok-kelompok yang terbentuk dengan memandang perang sebagai cara yang terbaik untuk mencapai kemerdekaan. Seperti halnya dengan Gerakan Nasional Pembebasan Kosovo (Lëvizja Kombëtare për Çlirimin e Kosovës, LKÇK) dan KLA (Kosovo Liberation Army). Sebagaimana tertulis jelas dalam namanya, sangat mudah untuk mengetahui tujuan dibentuknya: menciptakan tentara Kosovo yang akan memulai perjuangan pembebasan melawan penindas. KLA muncul dengan arahan yang dimaksudkan untuk mengatur fungsi internal dan strategi perangnya (Phillips & Burns, 2012). Oleh sebab itu KLA harus melakukan tindakan pembebasan dengan karakter yang adil, dan tidak menyerang struktur sosial-udaya, penduduk sipil dan subyek yang penting bagi kehidupan rakyat. Lebih lanjut ditetapkan bahwa subject serangan dari KLA adalah;

- Aparat militer dan polisi, termasuk peralatan telekomunikasi musuh;
- Unit-unit polisi khusus, sukarelawan, personel paramiliter, serta kombatan yang dibawa dari Kroasia dan Bosnia ke Kosovo;
- Orang Albania yang, setelah terindikasi, diidentifikasi sebagai pengkhianat dan bekerja sama dengan pasukan musuh;
- Dan yang terakhir, tindakan militer tidak diizinkan untuk dilakukan di ruang publik, yaitu di tempat-tempat di mana beresiko terhadap kehidupan orang-orang sipil (Bekaj, 2010).

Pangkalan organisasi ini berada di Drenica, wilayah yang paling terbelakang di Kosovo, nantinya secara historis, wilayah ini akan dikenal karena upaya

pemberontakan dan penindasan oleh pasukan Serbia. Secara konkret, pusat koordinasi kegiatan kerahasiaan KLA adalah desa Prekaz, yang berada di luar jangkauan Beograd sejak 1991 (Judah, 2018). Adem Jashari, dari Prekaz, yang kemudian dikenal sebagai pemimpin sekaligus penopang kekuatan moral untuk menginspirasi anggota KLA. Di sepanjang tahun ini, para anggota tentara mulai dikirim secara sembunyi-sembunyi ke Albania untuk menjalani pelatihan militer intensif misalkan keterampilan intelijen / kontra-intelijen, aksi-aksi militer rahasia, dan jenis-jenis perang gerilya. Mereka dilatih oleh pensiunan pejabat militer Albania, yang bersedia menjadi sukarelawan dan berbagi keahlian pribadi mereka dengan anggota KLA (Raxhimi, Montgomery, & Kara, 2009).

Meskipun baru didirikan pada tahun 1991 dan pertama kali muncul pada tahun 1993, KLA baru mendapatkan perhatian serius setelah tahun 1996, dan khususnya setelah kekacauan tahun 1997 di Albania yang memberikannya kesempatan untuk memperoleh senjata yang jumlahnya sangat sedikit. Penumpasan pasukan militer, paramiliter dan polisi Serbia oleh KLA meningkat pada kuartal pertama 1998. Pada tahap ini, KLA masih memperkuat barisannya, dan mempraktekkan taktik serangan secara gerilya terhadap instalasi utama militer Serbia (Freedman, 2000). Serangan serius pertama yang diterima Serbia terjadi pada akhir Januari 1997, ketika tiga anggotanya tewas sebagai akibat dari penyergapan di utara Prishtina (Amnesty, 1998). Serangan ini meninggalkan celah dalam struktur organisasi KLA sejak salah satu dari pemimpin mereka gugur, Zahir Pajaziti, yang merupakan koordinator untuk wilayah Llap di timur. Namun, penindasan juga dijadikan KLA sebagai argumen untuk memobilisasi lebih banyak orang, meyakinkan mereka bahwa perlawanan bersenjata dari tentara yang baru muncul adalah satu-satunya tanggapan yang tepat. Penindasan dijadikan justifikasi KLA sebagai argumen untuk memobilisasi lebih banyak orang, meyakinkan mereka bahwa perlawanan bersenjata adalah satu-satunya tanggapan yang tepat (Pesic, 2006).

Pada pertengahan tahun tampaknya apa yang telah dilakukan KLA membuahkan hasil di mana mereka berhasil mengambil alih sekitar sepertiga wilayah Kosovo, meskipun bukan di daerah-daerah dimana mereka mendapatkan

perlawanan yang serius (Fritz, 2018). Awalnya kehadiran KLA tidak disambut baik oleh Barat, dengan pandangan mata tertuju kepada Bosnia dimana Milosevic masih dipandang sebagai penjamin misi perdamaian. KLA dianggap organisasi teroris oleh Amerika Serikat, sebuah anggapan yang nantinya diadopsi Beograd sebagai justifikasi mereka untuk mengambil langkah serius di dalam menangani mereka (BBC, 2000). Pada akhir Februari 1998, pasukan khusus Serbi/Yugoslavia masih melakukan penyerangan yang bersifat sporadis terhadap kelompok militan KLA dan penduduk sipil di desa-desa Qirez dan Likoshan, di bagian barat-tengah Kosovo. Dua puluh empat warga sipil dibantai, yang menyebabkan kemarahan di media internasional dan organisasi hak asasi manusia, seperti Human Rights Watch (ICTY, 2014). Tercatat konflik tersebut secara keseluruhan mengakibatkan ribuan orang tewas, kerusakan fisik seperti penghancuran properti dan infrastruktur, dan diperkirakan 250.000 orang Albania Kosovo kehilangan tempat tinggal; kira-kira seperlima dari mereka kehilangan tempat berlindung (Boston, 2003).

Melihat respon yang begitu keras dari Serbia sehingga perhatian Komunitas Internasional mulai tertuju pada Kosovo. Adalah benar untuk mengatakan bahwasannya salah satu dari tujuan KLA adalah untuk menarik perhatian masyarakat internasional, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa. Menyatakan bahwa krisis yang mengalami eskalasi ini dipicu oleh Belgrade (Willigen, 2013). Tujuan dari LDK lainnya adalah melakukan lobi secara internasional untuk melibatkan negara-negara yang disebutkan di atas. Pemerintah ini, meskipun tidak diakui secara Internasional, dilihat sebagai pengelolaan krisis di Kosovo, atau sebagai mekanisme dimana ketidakpuasan Albania-Kosovo disalurkan (International Crisis Group, 1998). Dengan munculnya perlawanan bersenjata, ketidakpuasan yang tumbuh mulai menemukan sebuah lorong yang berbeda, yaitu melalui KLA.

B.2 Respon Internasional dan Diplomasi Terhadap Konflik Kosovo

Dari awal tahun 1998 aliansi Barat telah terpecah antara keprihatinan terhadap para korban perang dan kegelisahan akan terseret lebih jauh ke dalam situasi sulit di Balkan. Kampanye anti-KLA yang digemborkan selama musim semi di tahun 1998 mendorong kecaman internasional yang begitu kuat dan

menyebabkan perdebatan internal bagi Barat, mengenai apakah kekuatan ancaman diperlukan atautkah diterapkan untuk mencegah tragedi lain di Balkan. Resolusi PBB di bulan Oktober 1998, meskipun tidak benar-benar mengesahkan penggunaan kekuatan, namun resolusi itu telah menempatkan posisi Kosovo berada di piagam Bab VII, dan karena konflik Kosovo merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, sehingga menetapkan tuntutan kuat terhadap Beograd (Weller, 1999). Pada bulan Oktober 1998, utusan khusus AS Richard Holbrooke dikirim ke Beograd untuk memberikan misi ultimatum kepada Serbia agar segera menghentikan operasi militer. Setelah sembilan hari bernegosiasi dengan Richard Holbrooke, bertindak atas dasar *Contact Group*, Milosevic membuat beberapa hal (kesepakatan) terlihat substansial namun konsesi tersebut bersifat ambigu (O'Connell, 2000). Milosevic telah sepakat untuk menarik pasukannya dari Kosovo dan mengizinkan setidaknya 1,800 personel inspektur internasional yang tidak bersenjata ke Kosovo. Sebagai hasil dari kesepakatan, Milosevic meminta NATO segera menanggalkan rencananya untuk melakukan misi serangan udara. Karena memang sebelumnya Milosevic telah diancam dengan penggunaan kekuatan NATO. Hingga pada akhirnya NATO menyetujui namun hanya menanggukkannya (Solana, 1999).

Mengikuti perjanjian perdamaian yang dicanangkan Holbrooke, Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OSCE) mendirikan Misi Verifikasi Kosovo (KVM). Misi ini terdiri dari mantan atau perwira militer aktif yang bertugas sebagai warga sipil, dan pada Maret 1999 itu berjumlah hingga 1.400 anggota. Misi dari KVM adalah sebagai alat pemantau dan pelapor terkait kepatuhan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1199 (1998), yang menyerukan gencatan senjata dan "Penarikan unit keamanan yang digunakan untuk penindasan sipil" (OSCE, 2000). Rupanya laporan mereka begitu jelas, dimana situasi Kosovo pada saat itu benar-benar memprihatinkan. Perjanjian Holbrooke terbukti berumur pendek, KLA dan pasukan Serbia / Yugoslavia kembali terlibat dalam pertempuran. Berada di pusaran konflik, penduduk sipil Albania tak lepas dari penyerangan maupun penyergapan pasukan Yugoslavia (Crawford, 2002). Salah satu peristiwa yang menggemparkan opini publik internasional adalah tragedi pembunuhan warga sipil

yang terjadi di desa Reçak, yang telah menewaskan 45 orang, wilayah bagian barat Kosovo. Pasca kejadian tersebut duta OSCE KVN, William Walker, segera tiba di tempat lokasi pembantaian. Walker kemudian mengutuk pembantaian tersebut dan mengintruksikan Pengadilan Pidana Internasional agar melakukan penyelidikan di wilayah bekas Yugoslavia tersebut (Morrison, 2000).

Sementara itu, terdapat percepatan negoisasi dan diplomasi ulang-alik antara Beograd dan Prishtina (perwakilan KLA dan lainnya), yang dilakukan oleh berbagai diplomat barat, namun lebih pentingnya dipimpin oleh Holbrooke dan duta besar AS untuk Makedonia, Christopher Hill. Negoisasi ini menghasilkan dokumen yang disebut '*Contact Group Non-negotiable Principles/Basic Elements*', tertanggal 30 Januari 1999 (Art & Waltz, 2004). Di antara sepuluh poin yang tidak dapat dinegoisasikan telah digarisbawahi di dalam dokumen ini, terdapat penekanan yang dibutuhkan untuk mengakhiri kekerasan dan menemukan solusi damai melalui jalur dialog, dan seruan untuk kesepakatan yang memungkinkan mekanisme penyelesaian akhir setelah periode 3 (tiga) tahun. Dokumen ini juga menjamin integritas teritorial FRY. Keterlibatan komunitas internasional memuncak selama upaya penyusunan bersama *Contact Group*. Sebuah formasi *ad hoc*, yang terdiri dari US, UK, Perancis, Jerman, Italy dan Russia untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian di Kosovo. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, *Contact Group* memanggil Prishtina dan Belgrade untuk berunding di Rambouillet, Perancis, untuk bernegoisasi dan menandatangani "*Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo*" (Weller, 1999).

Delegasi Kosovo terdiri dari keseluruhan faktor-faktor politik, dan dipimpin oleh perwakilan KLA, Hashim Thaci. Bahkan sepertiga dari delegasi berasal dari kelompok perlawanan bersenjata, sepertiga mewakili partai LDK Dr. Rugova, dan sepertiga adalah partai partai baru yang disebut The United Democratic Movement (Lëvizja për Bashkim Demokratik, LBD), yang dipimpin oleh akademisi Rexhep Qosja, yang lebih dekat dengan sayap bersenjata. Dua anggota independen, humas, juga bagian dari tim. Sedangkan FRY/Serbia terdiri dari politisi tingkat menengah yang nantinya akan memberi laporan kepada Milosevic di Beograd (Obradovic &

Wochnik, 2011). Perundingan damai dimulai kembali di Paris antara 15 dan 18 Maret 1999, pada titik dimana Kosovo menandatangani isi dokumen tersebut. Dokumen Rambouillet yang dimaksud akan memberikan perdamaian untuk sementara waktu dan membentuk pemerintahan sendiri di Kosovo. Perjanjian tersebut akan menjamin integritas teritori dari FRY/Serbia dan juga sebagai fasilitator sebuah konferensi internasional setelah 3 tahun untuk diadakannya penentuan status politik di Kosovo dengan “mempertimbangkan kesediaan (atau kerelaan) masing-masing kelompok (United State Institute of Peace, 1999). Delegasi Kosovar memahami ini sebagai kesepakatan sementara yang akan membuka jalan bagi referendum dan kemerdekaan. Beograd menolak menandatangani dokumen itu. Sementara itu, UNHCR memperkirakan bahwa antara Januari dan pertengahan Maret, 150.000 hingga 200.000 pengungsi terpaksa keluar dari rumah mereka karena tindakan keras yang dipercepat oleh pasukan Serbia/Yugoslavia (William, 2008). Pada 20 Maret, OSCE mengevakuasi personel KVM-nya dari Kosovo (Roberts 2000). Sementara itu, UNHCR memperkirakan bahwa antara bulan Januari dan pertengahan Maret, 150.000 hingga 200.000 pengungsi terpaksa keluar dari tempat tinggal mereka mengingat tindakan kekerasan yang dilakukan pihak Serbia semakin meningkat. Pada 20 Maret OSCE mengevakuasi personel KVM-nya dari Kosovo (Brunette, 2003).

Setelah Rambouillet, upaya terakhir membujuk Beograd untuk menyetujui persyaratan atau menghadapi konsekuensi menghadapi militer berakhir dengan jalan buntu. Melihat bahwa semua sarana diplomatik sudah tidak ada dan sia-sia, pada tanggal 24 Maret 1999 aliansi NATO meluncurkan serangan udara ke militer Serbia/Yugoslavia dan instalasi lainnya (Posen, 2000). Kampanye pengeboman NATO berlangsung selama 78 hari, hingga pada akhirnya rezim Milosevich menyerah dan berakhir dengan penarikan pasukan Serbia di wilayah Kosovo.

B.3 Proses Menuju Kemerdekaan Kosovo Melalui Jalur Soft Diplomasi

Setelah berakhirnya proses kapitulasi Belgrade, UNSCR kemudian segera diresmikan pada bulan Juni 1999, yang nantinya akan menindaklanjuti rencana penting untuk menyusun masa depan Kosovo (UNSCR 1244). Di sisi kemiliteran,

tindakan yang dipimpin NATO untuk mengerahkan pasukan internasional Kosovo (KFOR) bertujuan untuk mempromosikan keamanan dengan cara membangun lingkungan yang aman di provinsi tersebut. Sejarah yang cukup besar dan ekstensif bagi usaha NATO, dengan mengerahkan 50,000 tentara dan personel lainnya pada tingkat tertinggi, KFOR akan mengambil pasukan dari 24 negara anggota dan negara mitra (Mertus, 2008). KFOR sendiri berada di bawah perjanjian teknik kemiliteran antara NATO dan masing-masing pemerintahan dari Republik Federal Yugoslavia dan Republik Serbia. Dari sudut pandang masyarakat sipil, UNSCR 1244 dianggap sebagai pintu pembuka untuk melakukan ekspansi kemiliteran dan rekonstruksi intervensi masyarakat sipil di dalam sejarah Eropa moderen, yaitu melalui pembetulan Misi Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kosovo (UNMIK) (Cottey, 2009). Di dalam pembacaan 'kalimat-kalimat dasar' UNSCR 1244, status akhir konstitusional Kosovo telah dibiarkan terbuka. Menurut dewan keamanan, setidaknya, sebuah negara Kosovo yang terpisah dan sepenuhnya merdeka, hanyalah salah satu dari beberapa yang masih berada di meja. Sementara perlu menegaskan kembali komitmen semua negara anggota pada 'kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federasi Yugoslavia', UNSCR 1244 juga mengamankan mandat kepada UNMIK untuk memfasilitasi proses politik yang didesain untuk meningkatkan masa depan Kosovo.

Cara kerja UNMIK digambarkan sebagaimana 'usaha bersama yang dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi berbeda, keluasan sejarah dan ruang lingkup. Pada satu titik di tahun 2006 memperkerjaka lebih dari 6000 staf, dan menghabiskan biaya operasional sekita 2,6 miliar Euro. Cara kerja tersebut telah dibagi ke dalam 4 (empat) pilar, dengan spesifikasi peran yang ditunjukkan kepada UN, OSCE dan EU. Dua pilar pertama, 'hukum dan keadilan' dan 'administrasi sipil, yang nantinya akan diatur oleh PBB; instrumen OSCE memiliki tugas untuk melakukan demokratisasi dan membangun institusi; sedangkan EU ditugaskan untuk melakukan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi (France, 2007). UNMIK akan mengambil perannya dari memonitoring, melaporkan, memfasilitasi proses keterlibatan Kosovo di dalam perjanjian internasional, dialog antara pristina dan Belgrade, dan beberapa fungsi-fungsi tertentu yang akan dibahas bersama Belgrade

(UNMIK, 1999). Fungsi-fungsi umum ini telah diuraikan di dalam surat oleh Sekjen kepada presiden Serbia. Secara khusus, operasi layanan kepolisian Kosovo di wilayah etnis mayoritas Serbia akan tetap berada di bawah keseluruhan otoritas PBB. Pengadilan negeri juga akan dibentuk di wilayah mayoritas Serbia yang beroperasi dalam sistem pengadilan Kosovo dan berdasarkan hukum yang berlaku di dalam kerangka Resolusi 1244 (Welski, 2014).

Pada tahun 2004 hingga 2005, persiapan sedang dilakukan untuk membicarakan masa depan status politik Kosovo. Merefleksikan keadaan politik pada masa itu, kebutuhan untuk peninjauan mekanisme keamanan menjadi semakin umum. Pada tahun 2005, Perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB sekaligus kepala UNMIK, Soren Jessen Petersen, menginisiasi adanya *Internal Security Sector Review (ISSR)*, yang kemudian disatukan oleh *Security Sector Development Advisory Team (SSDAT)*, yang terdiri dari tenaga ahli internasional maupun lokal (Welch, 2014). Studi holistik datang pada saat Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri baru saja terbentuk. Studi ini menekankan penguatan pada kedua kementerian tersebut, serta menajaki adanya kemungkinan untuk mendirikan Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2005, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari sebagai Utusan Khususnya, menuntut Ahtisaari untuk memimpin negosiasi antara Prishtina dan Beograd tentang status politik Kosovo di masa depan. Sebuah kesepakatan yang nantinya dikenal dengan *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* (Kuvendi Kosoves, 2007). Proposal itu akan menawarkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial kepada Kosovo, sementara Serbia akan mendapatkan kendali atas kebijakan luar negeri, pertahanan, kontrol perbatasan, kebijakan moneter dan bea cukai, perlindungan warisan agama, budaya Serbia dan hak asasi manusia. Kosovo juga akan terus diwakilkan oleh lembaga-lembaga intitusi Serbia (European Stability Initiative, 2007). Otoritas Kosovo, di sisi lain, mempertahankan desakan mereka untuk memerdekakan diri. Misi ini menyimpulkan bahwa posisi kedua belah pihak terhadap proposal penyelesaian Kosovo tetap berjauhan.

Serbia kemudian meluncurkan inisiatif untuk memulai tahap negosiasi baru pada status Kosovo dan Metohija. Hal ini beralasan bahwa substansi dan proses

perundingan Ahtisaari sama sekali tidak dapat diterima oleh Serbia. Oleh karena itu, negosiasi baru harus dimulai tanpa pembebanan batas waktu. Sementara itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat mulai melobi Dewan Keamanan mendukung elemen-elemen rancangan resolusi yang akan mendukung proposal Ahtisaari (Brusylovska, 2010). Tidak ada harapan untuk mencapai resolusi yang akan mendukung kemerdekaan Kosovo secara langsung. Pendekatan yang lebih sederhana hanya akan mencari dukungan yang lebih substansial terhadap rencana Ahtissari dan otoritas dari pelaksanaan misi yang baru. Masing-masing negara kemudian akan bebas untuk mengambil pandangan tentang pengakuannya, tanpa Dewan Keamanan menyatakan dirinya sebagai bagian dari negara bagian. Presentasi berbagai rancangan di New York yang disertai dengan upaya intensif dari para menteri luar negeri Uni Eropa untuk mengubah sikap pemerintah Rusia, yang melibatkan serangkaian kunjungan ke Moskow. Upaya-upayan ini tidak berhasil.

Upaya mencapai kesepakatan pada pertemuan G-8 di Heiligendamm, Jerman, pada 6 - 8 Juni juga gagal. Namun, ketika pertemuan sedang berlangsung Perancis mencuri perhatian Kanselir Jerman sekaligus Angela Merkel yang pada saat itu sebagai host. Perancis seharusnya 'mengantarkan Rusia' kepada rencana *Ahtissari*. Namun justru sebaliknya, Presiden Perancis yang baru terpilih, Nicolaz Sarkozy, secara mengejutkan mengusulkan periode selama 120 hari untuk melakukan negoisasi, setelah itu, jika masih belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, Dewan Keamanan harus mendukung proposal tersebut (Antonenko, 2007). Periode 120 hari adalah sama dengan periode transisi yang telah diramalkan oleh proposal komprehensif yang diajukan *Ahtissari*. Kosovo sendiri akan memiliki waktu 120 hari untuk mendapatkan pengesahan proposal oleh Dewan Keamanan untuk mengadopsi konstitusi dan bagian bagian-bagian kunci dari peraturan yang telah di dalamnya telah diprediksi. Kesimpulan pada masa ini adalah, mekanisme implementasi internasional yang baru akan mengambil alih, dan mungkin, Kosovo akan bebas untuk menyatakan kemerdekaanya. Dua hari setelah konferensi Heiligendamm, Presiden Amerika Serikat, George Bush mengunjungi Albania, dan menjanjikan percepatan kemerdekaan Kosovo. Namun, ternyata, terdapat negoisasi

yang masih berlanjut. Pada bulan Juli, Belgia, Perancis, Jerman, Italia, UK dan Amerika Serikat mengajukan rancangan formal resolusi, yang mencerminkan unsur-unsur prakarsa Perancis di dalam mendukung negoisasi (Weller, 2008). Alih-alih dukungan formal dari rancangan *Ahtissari* dan rekomendasi mengenai status yang di harapkan selama akhir dari periode 120 hari, dianggap kurang kuat dan meyakinkan. Draft resolusi tersebut *me-recalled*;

“Keadaan khusus yang membuat Kosovo menjadi kasus sui generis adalah akibat dari disintegrasi bekas Yugoslavia, termasuk kekerasan dan penindasan besar-besaran yang terjadi di Kosovo hingga dalam periode tahun 1999, Periode yang cukup lama dari administrasi internasional di bawa resolusi 1244, dan proses yang dipimpin PBB untuk meentukan status, sehingga kasus ini tidak dianggap sebagai preseden oleh Dewan Keamanan (The Economist, 2007)”

Rancangan ini kemudian memberikan kesempatan untuk melakukan proses negoisasi selanjutnya, yang difasilitasi oleh Uni Eropa dan *Contat Group*. Dewan akan akan meninjau situasi lebih lanjut dalam proses negoisasi tersebut. Pada akhir periode dari 120 hari, dan terlepas dari hasilnya, kehadiran UNMIK sipil internasional di Kosovo akan segera digantikan oleh International Civil Representative (ICR), yang dicalonkan oleh UE, yang akan mengepalari Misi Hukum Keamanan dan Kebijakan Pertahanan Eropa di Kosovo. Rupanya, Proposal yang telah diajukan Perancis dianggap sebagai perangkap oleh Russia dan Serbia di mana negoisasi yang terus berlanjut akan memberikan daun ara sebagai pengesahan terakhir dan dukungan secara otomatis terhadap dokumen *Ahtisaari* setelah berakhirnya masa 120 hari (Dalipi, 2013). Rancangan resolusi yang telah ditempatkan sebelum dewan menyarankan dukungan otomatis dari rencana pada saat itu. Meskipun demikian, rancangan tersebut menimbulkan kecurigaan tertentu. Sebagai balasan atas keberlanjutannya proses negoisasi, dewan akan menyetujui untuk mengimplementasikan struktur-struktur terhadap *Ahtisari Plan* (Perritt, 2010). Dengan demikian terdapat kemungkinan bagi Uni Eropa, US dan beberapa

negara lainnya untuk mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat tanpa adanya dukungan dari Dewan Keamanan, dan masih harus mengatur independensi sebagaimana yang telah diramalkan di dalam proposal komprehensif. "Ini semacam otomatisitas dari *Ahtisaari Plan*", kata Vitaly Churkin, perwakilan permanen Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bryanski, 2007).

Pembicaraan yang diadakan dalam kurun waktu 2006 hingga 2007 tidak membuahkan hasil kesepakatan. Hingga pada akhirnya *Contact Group* kemudian mencanangkan perundingan yang diberi nama Troika (*Troika Talks*), dipimpin oleh Duta Besar Wolfgang Ischinger dari Jerman untuk Uni Eropa, bersamaan dengan Alexander Botsan-Hartchenko dari Russia, dan Frank Wiesner dari Amerika Serikat. Inisiatif ini disambut baik oleh Sekjen PBB, yang kemudian meminta laporan tentang usaha itu pada 10 Desember 2007 (Kim & Woehrel, 2008). Troika menegaskan kembali bahwa mereka akan bertindak sesuai dengan dasar-dasar Resolusi Dewan Keamanan 1244 (1999) dan panduan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *Contact Group*. Troika juga setuju bahwa untuk sementara waktu persetujuan terhadap Ahtisaari masih akan di atas meja, Troika akan mendukung kesepakatan apapun yang bisa dicapai oleh beberapa pihak. Dalam diskusi pertamanya, Serbia meminta Troika untuk segera mencari solusi cepat untuk menemukan titik kesepakatan internasional yang akan mendukung status otoni Kosovo (Guéhenno, 2015). Pada beberapa momen Duta Besar Ischinger mer-*recall* kembali permasalahan yang dialami 2 (dua) Jerman yang terpisah di masa itu, yaitu Republik Federal Barat Jerman (FRG) dan Republik Demokratik Jerman Timur. Sebelumnya FRG telah menolak kedaulatan *de jure* GDR, meskipun tidak secara *de facto* (Shkreli, 2013). Sementara perjanjian itu disimpulkan tanpa mengurangi *prejudice* terhadap perbedaan pandangan antara FRG dan GDR pada permasalahan yang mendasar, termasuk permasalahan nasional, hingga pada akhirnya kedua negara sepakat untuk melakukan normalisasi, membangun konsep hubungan ketetanggaan yang baik antara satu sama lain atas dasar kesetaraan hak (Steele, 2008). Perjanjian itu juga menegaskan bahwa kedua negara akan saling menghormati atas dasar kemerdekaan dan otonomi masing-masing di dalam kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Hingga kedua negara bagian tersebut

memutuskan sebuah perjanjian pada tahun 1972, dimana mereka setuju dan tidak setuju terhadap pandangan satu sama lain mengenai posisi hukum mereka masing-masing (Low, 2015). "Mari kita selesaikan isu-isu praktik saat ini juga", ungkap Ischinger. Serbia adalah Serbia sedangkan Kosovo adalah Kosovo. Kedua entitas dapat menyetujui untuk mengatur sebuah hubungan dalam bentuk kerja sama ekonomi dan membentuk badan-badan pemerintahan secara bersama, sementara menangguhkan sengketa status Kosovo sebagai provinsi atautkah negara yang berdaulat.

Tabel 2.1
Peristiwa Troika

Tanggal	Peristiwa
9 Agustus	Pertemuan pertama antara Troika dengan perwakilan grup (contact group) (London)
10 – 12 Agustus	Pertemuan pertama Troika dengan partai-partai (Beograd dan Pristina)
30 Agustus	Pertemuan kedua Troika dengan partai-partai (Wina)
18 – 19 September	Pertemuan ketiga Troika dengan partai-partai (London)
27 September	Pertemuan Troika dengan Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal Uni Eropa/ Perwakilan Tinggi, Sekretaris Jenderal NATO dan menteri perwakilan grup (New York)
28 September	Pertemuan keempat Troika dengan partai-partai – pertemuan langsung pertama (New York)
14 Oktober	Pertemuan kelima Troika dengan partai-partai – pertemuan kedua langsung (Brussels)

22 Oktober	Pertemuan keenam Troika dengan partai-partai – pertemuan langsung ketiga (Wina)
5 November	Pertemuan ketujuh Troika dengan partai-partai- pertemuan langsung keempat (Wina)
20 November	Pertemuan kedelapan Troika dengan partai-partai – pertemuan langsung kelima (Brussels)
26/27/28 November	Pertemuan kesembilan Troika dengan partai-partai – pertemuan langsung keenam (Baden, Australia)
3 Desember	Pertemuan kesepuluh Troika dengan partai-partai (Belgrade dan Pristina)

Dalam pandangan Serbia, gagasan perjanjian Ischinger dianggap sebagai 'perangkap baru'. Alih-alih menawarkan penundaan yang jelas terhadap periode sementara *status quo* yang mana akan dipertahankan, proposal tersebut secara tersirat mengindikasikan bahwa Kosovo berhak untuk mendeklarasikan kemerdekaan dan mencari pengakuan internasional (Jovanovic, 2018). Satu-satunya keuntungan bagi Serbia adalah pihaknya juga akan memiliki hak untuk terus mempertimbangkan Kosovo sebagai bagian dari kedaulatannya, hal sama yang dapat dilakukannya. Rupanya Kosovo juga tidak tertarik dengan ide Ischinger, Terlepas itu akan melibatkan pembekuan kampanye kemerdekaan untuk periode sementara waktu, ataukah kesepakatan untuk penundaan status, maka hal itu akan menambah legitimasi Serbia terhadap kemerdekaan Kosovo (Borger, 2007). Namun inisiatif Ischinger, yang mana sering diberikan dukungan oleh Amerika Serikat, menawarkan Pristina jalan keluar dari dilema yang sulit tentang bagaimana terlibat dengan dengan putaran negoisasai yang baru. Kosovo tidak ingin tampak obstructif. Disisi lain, perundingan hanya bisa mengurangi paket dari Ahtisaari yang telah disetujui Kosovo (Swiss Peace, 2007).

Secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) sesi di dalam negoisasi, termasuk konferensi yang dilakukan selama tiga intensif di Baden, Austria, dalam pertarungan terakhir untuk mencapai kesepakatan. Sesuai dengan gaya negoisasi Rembouillet

dan Wina, pertemuan diadakan untuk terakhir kalinya. Pada akhirnya Troika menyimpulkan; Setelah 120 hari negosiasi intensif dilakukan, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai status Kosovo. Tidak adap pihak yang mau menyerah pada permasalahan mendasar tentang kedaulatan (UNSC, 2007).

C. Deklarasi Kemerdekaan Secara Sepihak (*Unilateral Declaration of Independence/UDI*) Kosovo

Hingga akhir tahun, Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan bahwa kebuntuan saat ini dapat menyebabkan peristiwa di lapangan yaitu 'momentum mereka sendiri, menempatkan para risiko serius terhadap pencapaian dan waisan PBB di Kosovo. Bergerak maju untuk menentukan masa depan status Kosovo yang menjadi prioritas utama untuk Dewan Keamanan dan Komunitas Internasional. Dia menambahkan, bahwa setelah pemilu di Kosovo baru-baru ini telah membawa kekuatan kepada pemimpin KLA Hashim Tachi, terdapat harapan yang begitu besar bahwa kemerdekaan sudah semakin dekat (Security Council, 2008). Di seberang lain, Parlemen Serbia lebih lanjut megadopsi resolusi untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial, dan tatanan konstitusional republik. Hal tersebut tentu akan mengancam peninjauan kembali pada hubungan diplomatik terhadap negara-negara yang akan mengakui kemerdekaan Kosovo dan mengindikasikan bahwa kemungkinan (Serbia) akan mengambil beberapa tindakan untuk melindungi populasi etnis Serbia di wilayah tersebut (National Assembly of The Republic Serb, 2007). Pemerintah Serbia kembali mengusulkan proposalnya terkait dengan otonomi dan pembicaraan yang lebih intensif.

Konsultasi di Dewan Keamanan PBB berlanjut dari bulan Desember dan seterusnya. Pada bulan Januari 2008, Presiden Tadic dari Serbia berbicara kepada Dewan Keamanan. Dia mengklaim bahwa Beograd telah melakukan negosiasi secara konstruktif selama dua tahun. 'Otonomi secara substansil telah menunjukan berbagai model yang berfungsi, berkelanjutan dan tujuan sukses. Hal ini telah terbukti bahwa solusi tersebut sesuai dengan hukum internasional dan bahwa cara itu merupakan satu-satunya cara untuk mencapai ompromi dalam konflik yang mirip dengan konflik Kosovo' (United Nations, 2008). Pengakuan sepihak terhadap

kemerdekaan Kosovo, menurutnya, akan menciptakan preseden yang menyebabkan konsekuensi tak terduga bagi kawasan lain. Sebaliknya, ia mendesak dimulainya kembali negosiasi pada pembahasan otonomi (Bilefsky, 2010). Tadic juga berjanji bahwa pemerintahannya akan menggunakan sarana hukum dan demokratis untuk melestarikan kedaulatan dan integritas Serbia, ia menegaskan sekali lagi bahwa Serbia tidak akan menggunakan kekerasan ataupun berperang. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Perdana Menteri Luar Negeri Serbia pada pertemuan lebih lanjut di tanggal 14 February 2008, yang telah dilaporkan oleh Russia dan Serbia bahwa kemerdekaan Kosovo sudah semakin dekat. Serbia meminta dengan sia-sia bahwa konsili mengutuk pihak berwenang di Pristina untuk menyatakan kemerdekaan (Euractive, 2008).

Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Februari 2008. Dalam deklarasinya Majelis Kosovo mencatat bahwa Kosovo merupakan kasus eksklusif yang timbul dari disintegrasi non-konsensus Yugoslavia dan bukan preseden terhadap situasi lain. Dalam substansinya;

“Kami, para pemimpin yang terpilih secara demokratis dari rakyat kami, dengan ini menyatakan Kosovo sebagai negara merdeka dan berdaulat. Deklarasi ini mencerminkan kehendak rakyat kami dan sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi dari utusan khusus PBB, Martti Ahtisaari, dan Comprehensive Proposal dari penyelesaian status Kosovo”.

“Kami menyatakan bawa Kosovo akan menjadi republik yang demokratis, sekuler dan multi-etnis, dipandu dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan perlindungan yang setara di bawah payung hukum. Kami akan melindungi dan mempromosikan hak kepada keseluruhan masyarakat di Kosovo dan menciptakan kondisi yang diperlukan partisipasi efektif dalam proses politik dan pengambilan keputusan (The American International Law, 2008)”.

Parlemen Serbia segera mengadopsi keputusan yang dimaksudkan untuk membatalkan deklarasi ini. Serbia dan Federasi Rusia juga segera memprotes di tingkat internasional, menuntut pertemuan mendesak Dewan Keamanan yang, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, akan membahas masalah Kosovo di depan umum¹. Pertemuan dibuka oleh Sekjen PBB, yang kemudian menginformasikan bahwa Majelis Kosovo memang telah menyatakan kemerdekaan dengan suara bulat dari 109 deputi yang hadir. Sekjen mencatat bahwa deklarasi tersebut telah menegaskan penerimaan penuh Kosovo terhadap kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam penyelesaian komprehensif serta kepatuhannya kepada Resolusi 1244 (1999) (Murati, 2017). Sekretaris Jenderal juga mencatat sebuah surat dari Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan (CFSP), yang menyatakan bahwa Uni Eropa akan menyebarkan misi aturan hukum dalam kerangka yang disediakan oleh Resolusi 1244 dan perwakilan khusus UE untuk Kosovo. Sekretaris Jenderal menegaskan, sembari menunggu menunggu paduan dari dewan, UNMIK akan terus menjalankan mandatnya di bawah Resolusi 1244 (United Nations Peace Keeping, 2018).

Dewan kemudian mendengar pernyataan dari Presiden dan Federasi Rusia yang mengutuk kemerdekaan Kosovo. Serbia meminta Sekretaris Jenderal menginstruksikan perwakilan khususnya di Kosovo, Mr Ruecker, untuk menyatakan tindakan pemisahan diri batal demi hukum. Russia juga menyatakan bahwa misi hukum Uni Eropa telah diluncurkan tanpa adanya mandat dari Dewan dan tidak dicakup oleh otoritas yang ada di dalam Resolusi 1244 (UN News, 2008). Pada 16 Februari 2008, satu hari sebelum deklarasi diumumkan, Dewan memutuskan untuk meluncurkan misi EULEX di Kosovo, Pieter Feith kemudian ditunjuk sebagai wakil khusus Uni Eropa di Kosovo (Consilium Europe, 2010). Dalam praktiknya keseluruhan misi UNMIK akan berpindah ke Misi Uni Eropa, dengan PBB akan terus memfokuskan perannya terhadap pelaporan dan pemantauan, serta memfasilitasi dialog antara Beograd dengan Kosovo. Secara keseluruhan hal tersebut tetap diterima oleh Resolusi 1244, meskipun entah bagaimana Kosovo

¹ Surat yang dikirim oleh Serbia melalui perwakilannya di PBB, dikirim ke Presiden Dewan Keamanan S/2008/103, tanggal 17 Februari 2008, No. 117 & Surat tertanggal 17 Februari 2008 dari Perwakilan Tetap Federasi Rusia di PBB ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan.

dapat melindungi posisinya, menunjukkan bahwa Kosovo akan bertindak sesuai dengan resolusi, daripada menerima validitas *de jure* untuk kesekian kalinya yang berkelanjutan (Spernbauer, 2010).

Sementara Russia tampaknya akan mempertahankan bahwa rencana ini belum disetujui hingga sekarang, sedangkan Sekjen PBB akan memberikan ruang terhadap dirinya sendiri untuk mengimplementasikan rancangan tanpa Resolusi Dewan Keamanan. Pada Sidang Majelis PBB ke-63 yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 2008, telah berhasil disahkan Resolusi 63/3 terkait “*Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on whether the unilateral declaration of independence of Kosovo is in accordance with international law*” (International Court Of Justice, 2009). Hasil pemungutan suara terhadap rancangan resolusi Serbia adalah 77 negara mendukung, 74 negara abstain, 6 negara menentang. Termasuk Rusia, China, dan lima anggota anggota EU yang diakui, resolusi ini didukung oleh Brasil, India, Indonesia, Nigeria dan Afrika Selatan. Sedangkan 6 negara yang menolahkan adalah keputusan tersebut adalah Amerika Serikat, Albania, dan 4 negara pasifik. 74 negara, termasuk keseluruhan anggota UE yang pada titik ini mengakui Kosovo, abstain. Sedangkan anggota yang tersisa termasuk Turki dan Bosnia Herzegovina memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara sama sekali. Pada tanggal 22 Juli 2010 Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) telah mengeluarkan *advisory opinion* yang menegaskan bahwa kemerdekaan Kosovo secara sepihak (*unilateral declaration of independence/UDI*) pada tanggal 17 Februari 2008 tidak melanggar hukum internasional (Milanovic & Wood, 2015).

D. Dinamika Keamanan Regional dan Interegional (Kemunculan Uni Eropa, NATO, dan Rusia Sebagai Aktor Eksternal di Dalam Konflik Kosovo)

Buzan dan Waever menunjukkan bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin, tingkat keamanan regional menjadi lebih *autonomous* dan otonomi keamanan regional ini merupakan pola spesifik dari periode saat ini. Sekali lagi, Teori *Regional Security Complex* menawarkan interpretasi baru dari struktur keamanan

dan membedakan antara tingkat interaksi kekuatan global (yang dapat melampaui batas-batas yang telah ditentukan) dan interaksi pada tingkat subsistem dari kekuatan kecil yang lingkungannya berada di daerah setempat. Itulah gagasan utama dari kompleks keamanan regional, dari ancaman yang paling berbahaya dan yang memiliki momentum waktu yang begitu singkat, ketergantungan keamanan (jejaring) dimodelkan oleh sekelompok negara yang membentuk kompleks keamanan. Hal ini terserap sepanjang sejarah sebagai metode untuk mengamati kemampuan ataupun potensi dan niat negara-negara tetangga, pada gilirannya, hal ini dikaitkan dengan proses sekuritisasi dan tingkat interdependensi keamanan. Melalui teori *Regional Security Complex* sebuah penciptaan model konseptual yang diinginkan meliputi struktur baru pada tingkat keamanan internasional, bersamaan dengan kekuatan-keuatan besar, sehingga masing-masing wilayah dapat menjadi aktor global.

Di dalam inti dari sebuah konsep neorealis yang diperkenalkan oleh Karl W. Deutsch, fenomena kompleks keamanan semakin menegaskan dirinya sendiri hingga pada akhir tahun 70-an, bahkan sejak tahun 50-an dan 60-an, di bawah konstruksi *community security* yang tak lain untuk menggambarkan bingkai dalam hubungan antarnegara di kawasan Atlantik Utara. Model integrasi regional oleh Deutsch kemudian berlanjut kepada proses integrasi Eropa. Deutsch mengafirmasi gagasan dari pembangunan wilayah-wilayah secara politis (Cinca, 2015). Pertama-tama adalah tentang UE sebagai entitas regional yang dibangun melalui jalur intervensi politik, dan yang kedua adalah NATO. Membuat sebuah pemisahan antara amalgamasi dan integrasi, Deutsch telah menunjukkan bahwa, “Komunitas Amalgamasi memiliki satu titik utama di dalam pengambilan sebuah keputusan, namun melalui hal itu tidak serta merta bahwa kebalikannya sepenuhnya bersifat anarki”, sementara “Integrasi komunitas memiliki lebih banyak pusat yang sesuai dengan negara yang membentuknya”, misalnya UE.

Untuk mengidentifikasi kompleksitas keamanan perlu dilakukan investigasi terhadap wilayah-wilayah yang sudah dipastikan terikat. Hal ini telah didefinisikan sebagai. “Wilayah yang koheren dari sudut pandang ruang, yang disusun oleh dua negara atau lebih”. Dan juga dapat ditemukannya, “Sub-wilayah adalah bagian dari

suatu daerah dan dapat mencakup beberapa negara bagian (tetapi lebih sedikit daripada jumlah total negara bagian di dalam daerah tersebut) atau dapat juga memiliki majelis kenegaraan, bagian dari negara tertentu atau keduanya. Wilayah mikro mengacu kepada tingkat kesatuan di dalam batas-batas wilayah suatu negara (Buzan, 1991). Menurut Buzan, dalam kaitannya dengan keamanan, wilayah diartikan sebagai *Sui Generis* dan subsistem krusial yang dibentuk oleh sekelompok negara yang menunjukkan akan adanya kedekatan geografis dengan wilayah lainnya (McSweeney, 1999). Kedekatan dan identifikasi di tiap-tiap wilayah yang terdefinisi dengan baik merupakan instrumen yang begitu penting untuk membedakan dan memisahkan wilayah X dengan ruang lainnya. Oleh sebab itu Buzan telah menggarisbawahi 2 (dua) faktor fundamental yang dapat mendefinisikan struktur keamanan regional; diantaranya adalah *Balance of Power (The Power Relations)* yang nantinya akan menunjukkan seberapa banyak aktor yang berada di dalam kompleksitas dan keberadaan kecenderungan hubungan *amity* ataupun *enmity* (Buzan & Wæver, 2003).

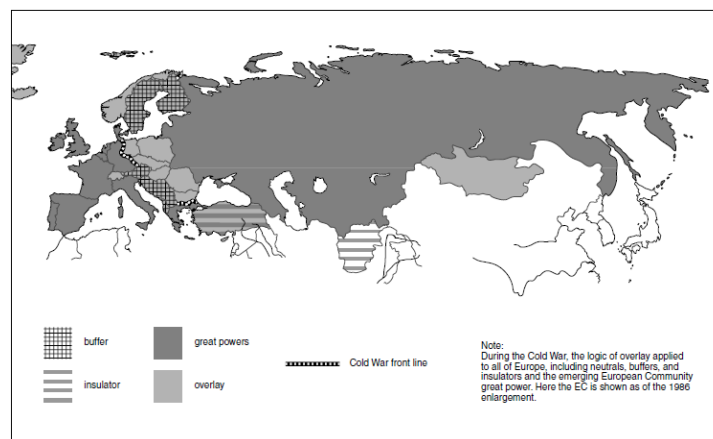
Seperti yang telah diperhatikan di dalam analisis kompleks keamanan, Buzan menggunakan variabel klasik, (kedekatan geografis, *power relations*, *external elements*, *interdependence of security*), sebagian juga merupakan inspirasi dari konstruktivis, yaitu konstruksi sosial hubungan antar negara. Untuk memberikan sebuah kebenaran yang dibutuhkan adalah mengarahkan studi tentang keamanan di tingkat regional (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998). Buzan dan Wæver telah menggarisbawahi mengenai pentingnya definisi kekuatan yang dihadapi. Untuk mengklasifikasikan hubungan kekuasaan (*power relations*) dan mengidentifikasi karakteristik mereka, Buzan dan Wæver menggunakan unsur-unsur dari realisme klasik. Hampir dari sebagian negara saat ini tidak begitu terorganisir, tidak seperti selama periode Perang Dingin, sekitar dua negara adidaya, dikarenakan sistem internasional sudah mulai terbentuk dari berbagai jenis aktor, yang dianggap sebagai kekuatan besar ataupun kekuatan regional, yaitu UE dan Rusia di Eropa. Keseimbangan Kekuasaan lokal telah mempengaruhi sebagian besar dari model *amity-enmity* di tingkat regional. Dengan *amity* yang yang dipahami sebagai kecenderungan untuk melakukan kerja sama/persahabatan dan

enmity yang mengacu pada hubungan yang didirikan atas dasar rasa kecurigaan dan ketakutan (Stone, 2009).

Dalam permasalahan yang menyangkut *amity-enmity* kita dapat merangkumnya menjadi 3 kategori besar diantaranya adalah; konflik tipe kompleks, yang dicirikan oleh hubungan permusuhan, dengan kemungkinan konflik akan terus meningkat; kompleks dimana terdapat tingkat permusuhan rendah, khususnya untuk rezim keamanan; dan yang ketiga didasarkan kepada pola *amity*, yang membentuk komunitas keamanan (Andžāns, 2014). Melakukan identifikasi kompleks keamanan di dalam kawasan perlu melibatkan kekuatan interdependensi diantara negara-negara yang memiliki perbedaan dinamika. Interdependensi kemungkinan sifatnya positif (ketika tiap-tiap negara melakukan kerja sama atau memiliki sifat yang netral antarnegara lainnya) atau kebalikannya, negatif (ketika terdapat persaingan diantara negara-negara bagian). Kesalingketergantungan pun dibagi menjadi dua aspek; di satu sisi adanya hubungan antarnegara yang dilihat melalui *amity-enmity*, dan disisi lain adanya ancaman yang bersifat umum dan kepentingan keamanan (Eyvazov, 2017). Dalam konteks yang sama dikembangkan juga gagasan bahwa saling ketergantungan tidak selamanya berkaitan dengan kemiliteran, diplomatik, atau politik, karena mereka dapat bermanifestasi juga di level masyarakat, level ekonomi atau dalam hal keamanan lingkungan (Andzans, 2013). Inilah bagaimana mengidentifikasi kompleks keamanan regional melalui analisis keamanan melalui dimensi-dimensi di dalamnya. Perlu dicatat bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi kedua aspek yang penting bagi definisi kompleks keamanan tingkat regional: proses integrasi regional, dan di sisi lain memotivasi kepentingan aktor eksternal di dalam kompleks regional. Adapun faktor yang sedari awal merupakan basis dari kompleks keamanan regional, diantaranya adalah faktor-faktor lokal, kepentingan bersama dan nilai-nilai yang dianut, tingkat ancaman/ketakutan yang meningkat ataupun tingkat kepercayaan publik/persahabatan publik yang meningkat, dan kondisi sosio-politik ekonomi (Persson, 2018).

UE-Eropa merupakan bagian dari dunia yang paling dilembagakan. Meskipun *the exact nature* -nya UE masih menjadi perdebatan yang hangat,

eksperimennya pasca berdaulat tidak diragukan lagi mendorong integrasi regional secara damai ke dalam batas-batas yang baru. Eropa sendiri sedang mengembangkan bentuk-bentuk organisasi politik yang unik dengan tidak mereplikasi ke bentuk negara pada tingkat yang lebih tinggi, atau dengan menghilangkan sistem yang lama, akan tetapi dengan mencampur kontinuitas kedaulatan dengan formasi baru. Konsekuensinya unit keamanan Eropa menjadi khas (Mouritzen, Wæver, & Wiberg, 1996). Mendekati monopoli tradisional negara pada status keamanan dan tindakan keamanan ditantang di Eropa, dimana banyak objek-objek rujukan lainnya dari wilayah-wilayah kecil ke Uni Eropa sendiri, dari lingkungan hingga kepada nilai-nilai “universal” politik, yang kemudian ditindaklanjuti ke dalam mode keamanan.



Gambar 2.1

Cold War Europes: Bipolar Overlay

Sumber: (Buzan & Waever, 2003)

Seperti yang akan diterangkan pada sub-bab selanjutnya, bahwa selama Perang Dingin, wilayah yang nantinya merupakan EU-Eropa mengalami kondisi *overlay* dan isu keamanan masih mendominasi di kawasan yang didefenisikan secara eksternal. Keamanan politik selama Perang Dingin sebagian besar terdiri dari perjuangan atas bagaimana intensnya persaingan *securitise superpower* melawan desekuritisasi melalui *d’etente* atau deterensi (Aydinli & Rosenau, 2005). Pasca Perang Dingin EU-Eropa telah “dibebaskan” – meskipun keterlibatan Amerika masih berlanjut di salah satu organisasi terkemuka, NATO – dan agenda kemanan

yang pada awalnya terfragmentasi sehingga terhubung secara longgar yang menimbulkan pertanyaan serius tentang keterkaitan spasial ‘Eropa’ dan koherensi tematik dari ‘keamanan’ (Lucarelli, 2002). Satu dekade ke era pasca Perang Dingin, kekhawatiran mengenai keamanan sangat beragam namun mereka berada pada tingkat memadai ataupun cukup menjadi koheren bahwa gambaran baru telah muncul.

Diseberang lain, ambiguitas hubungan EU-NATO merupakan cerminan dari situasi rumit RSC di Eropa-bersamaan dengan kehadiran Amerika yang mana keduanya disambut baik dan menurut teori aliansi struktural yang mengejutkan dalam kaitannya dengan gambaran kekuatan yang begitu besar, dan tatanan UE yang berpusat di Eropa yang mungkin dalam jangka panjang nanti untuk membuat UE, bukan Amerika Serikat, sumber utama stabilitas di Eropa. Kehadiran Amerika dan kelanjutan NATO disambut baik karena mereka memiliki banyak efek besar di dalam menjaga kestabilan Eropa, akan tetapi, dalam jangka waktu panjang, terdapat perbedaan antara kekuatan eksternal dan kekuatan di kawasan (Uziębło, 2017). Keterlibatan AS akan selalu menjadi pilihan, bukan sebuah keharusan, dan ini sudah beberapa kali ditunjukkan dalam kecenderungan kebijakan AS untuk berfluktuasi secara ekstrim: mencoba untuk keluar, atau kebutuhan untuk mendemonisasi musuh karena lebih sulit untuk meyakinkan publik Amerika daripada Eropa tentang pentingnya kebijakan intervensi. Hal ini rupanya telah mengganggu dalam pembentukan keamanan di Eropa bahwa terdapat kemungkinan negara-negara Eropa akan terus memperkuat alternatif mereka untuk bergantung kepada AS (Vincze, 2007).

Diantara negara-negara anggota UE, komunitas keamanan terbentuk berdasarkan proyek integrasi. Proyek ini dibangun berdasarkan meta-sekuritisasi; ketakutan UE akan menjadi seperti masa lalu jika fragmentasi dan keseimbangan kekuasaan kembali dibiarkan. Proyek integrasi sendiri, walau bagaimanapun, akan menghasilkan proses sekuritisasi, yang sebagian besar adalah keamanan nasional yang mana secara keseluruhan merupakan ‘*societal security*’, yaitu ketakutan terhadap identitas ‘nasional’ (Naumescu & Dungaciu, 2015). Efeknya yang paling sering dalam bentuk umum adalah ‘kembali ke masa depan’, daripada ketakutan

dalam bentuk yang sudah pasti dari pihak lain. UE-Eropa memiliki struktur pusat pinggiran (*centre-periphery*): bagian ‘pusat’ Eropa mengatur dirinya sendiri sebagai lingkaran konsentris disekitar pusat bagian barat. Karena negara-negara ini termasuk dalam tatanan yang berpusat di UE, masalah keamanan dibagian benua ini sebagian mengikuti pola yang sama seperti di Eropa Barat tetapi memiliki komplikasi/kerumitan tambahan, misalnya karena adanya dependensi pada Eropa Barat sehingga keduanya merupakan jangkar dari stabilitas dan *line of intrusion*. Pusat (*core*) mengacu pada Eropa Timur pasca Perang Dingin (Buzan & Waever, 2003).

Setelah tahun 1989, beberapa elemen baru ditambahkan sebagai wacana keamanan di Eropa; imigran, konflik etnis, kejahatan terorganisir, dan terorisme. Daftar permasalahan di Eropa telah mencakup luas maksimum yang mencakup semua aktor dan hampir berada di seluruh tingkatan. Sebenarnya hal tersebut bukanlah isu yang baru, namun pasca berakhirnya Perang Dingin isu tersebut datang dan menjadi masalah keamanan. Konflik etnis di Eropa Timur adalah salah satu topik yang sering menjadi bahasan masalah keamanan di Eropa Barat pada awalnya 1990-an (kadang-kadang disebut sebagai ‘stabilitas regional’). Dan semakin meningkat, dan tergabung ke dalam sekuritisasi (Varenes, 1997). Pada dasarnya konflik etnis sangat begitu buruk, khususnya ancaman bagi keamanan Eropa Barat, jika konflik etnis menyeret kekuatan itu dipihak yang berseberangan dan dengan demikian dapat memicu kembalinya kekuatan politik diantara negara-negara *core-UE*. Fenomena itu tercermin pada beberapa konflik di Balkan yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar dengan kalkulasi efek dari integrasi UE/dinamika fragmentasi (Luxembourg Institute, 2006).

Untuk sebagian besar dari sejarah Eropa, Balkan bukanlah wilayah yang koheren, akan tetapi justru wilayah ini terbagi (sebagaimana di zaman akhir Yugoslavia) oleh beberapa divisi-divisi penting dalam sejarah Eropa, beberapa diantaranya mempengaruhi konstelasi politik di kawasan hingga saat ini. Semisal batas dari lingkup budaya Yunani, perbatasan antara Romawi Timur dan Barat, dan sebuah fakta bahwa *heartland* serta batas kekaisaran Bizantium jatuh di area ini: Batas kekuasaan dari suku-suku Slavia; batas dari kekaisaran Charlemagne; batas

antara Katolik dan gereja-gereja Orthodox; dan perbatasan antara kerajaan Turki dan Habsburg yang telah berabad-abad bergerak di wilayah ini. Wilayah Barat, Timur, dan Tengah Eropa kemudian dibedakan berdasarkan sejarah kekuasaan kekaisaran yang begitu panjang dan khususnya begitu ketika negara-negara Barat terbentuk. Perkembangan bagian tenggara adalah 'Timur' dengan karakteristik (khusus) kerajaannya adalah Ottoman. Balkan modern dibentuk oleh disintegrasi imperium Austria dan Ottoman (Buzan & Wæver, 2003). Banyak variasi diantara negara-negara penerus berasal dari perbedaan diantara kedua kerajaan ini, waktu, dan sifat disintegrasi mereka. Bagi *RSC*, dekade pertama pada abad ke-20 terdapat kepentingan khusus karena pada periode ini Balkan terlihat paling mirip dengan kondisi *RSC* yang terpisah, dilengkapi dengan Perang Balkan sendiri. Negara-negara yang baru lahir membentuk sistem *Balance of Power* yang saling bergantung sebagaimana yang disaksikan oleh koalisi-koalisi yang bergeser saat perang. Dalam hal ini banyak terlahir 'perang' *RSC*, jelas ini merupakan formasi konflik (Agir, 2014). Namun, keterpisahannya diragukan sedari awal: perang-perang kemerdekaan dan diantara negara-negara bagian tidak akan lepas dari konstelasi politik di Eropa.

Perang Balkan cukup rumit sehingga kawasan tersebut memperoleh peningkatan kemerdekaan di tahun-tahun itu hingga hal ini dihidupkan kembali selama Perang Dunia I, ketika dinamika Balkan dan Eropa tergabung. Pada periode antarperang atau masa *interbellum* telah menunjukkan semi-independen sebagaimana pada periode Pasca Perang Dingin (Hall, 2002). Sistem lokal *balance of power* sedang beroperasi, namun di dalam periode antarperang ini telah terhubung ke dalam dinamika Eropa yang lebih luas. Pembentukan awal Yugoslavia pada tahun 1918 berasal dari keputusan antar kekuatan-kekuatan besar, akan tetapi juga hasil dari konstelasi yang melibatkan banyak aspek, diantaranya adalah pan-ideologi dan nasionalisme (Helsinki Committee for Human Rights, 2017). Sementara sejarah nasionalis saat ini memproyeksikan unit-unit jauh ke sejarah masa lalu, telah terbuka pada beberapa level poin untuk menjadikan negara sebagai entitas politik yang utama: Dalmatia, Kroasia, Yugoslavia, atau kekaisaran Austro-Hungaria? Negara Slavia Selatan sejajar dengan Pan-Nasionalisme di

tempat lain di Eropa; Pan-Jermanisme, Pan-Skandinavianisme, dan Pan-Slavisme yang lebih luas (Prpič, 2005). Adanya ketegangan di dalam negara dilepaskan selama Perang Dunia II, ketika Kroasia yang masih semi-independen muncul di bawah perlindungan Jerman dan Italia. Gerakan fasis Ustasa secara kejam mengejar proyek Kroasia Raya dengan membantai ratusan ribu orang-orang Serbia, Yahudi, Roma, dan musuh politik lainnya. Setelah kemenangan Komunis di bawah Tito, Yugoslavia diciptakan kembali dengan batas-batas yang sebagian besar sama dan ketegangan internal yang sama (West, 2012).

Struktur penting dari sub-kompleks itu hampir sama dengan sebelum dan sesudah Perang Dingin, sementara itu selama Perang Dingin berbeda. Disintegrasi Yugoslavia seharusnya menandakan berakhirnya sebuah kutub dalam sub-kompleks. Hal ini, bagaimanapun, membuat sedikit perbedaan dari yang diharapkan. Dinamika yang sama hadir baik domestik maupun internasional, dan Beograd adalah pusat kekuatan dengan atau tanpa Yugoslavia. Batas sub-kompleks tetap tidak jelas: wilayah ini justru memiliki dua inti. Pertama konstelasi konflik orang Serbia, Kroasia, dan Bosnia; kedua, disekitar Makedonia yang melibatkan Albania, Serbia/Yugoslavia, Bulgaria, dan Yunani plus (dengan demikian) Turkey (Zimmermann, 1998). Sebagian karena status *Balkanhood*, anggota marjinal ingin ke luar, sedangkan kondisi batas luar tidaklah stabil, dengan negara-negara seperti Rumania, Hongaria, dan Turki menjadi lebih atau kurang terlibat dipelbagai titik waktu. Sub-kompleks akan selalu jelas, anarkis, tidak terpusat- akan memiliki polaritas dan *amity/enmity* seringkali sulit dijabarkan. Yugoslavia menjadi spesial selama Perang Dingin dengan menjadi sosialis namun tetap independen terhadap Uni Soviet (Szczepański, 2006). Yugoslavia dikala itu bertindak sebagai penyangga antara Barat dan Timur, dan oleh sebab itu secara luas dikhawatirkan bahwa meredanya konflik Barat dan Timur akan membuat Yugoslavia mengalami kesulitan: *raison d'être* eksternalnya dan struktur domestiknya cukup terhubung sehingga koherennya tidak bisa dijamin (Buzan & Wæver, 2003).

Sebagaimana konflik Kosovo yang secara gamblang telah menggambarkan kompleksitas keamanan di wilayah. Hal ini dikarenakan dalam proses perjuangan Kosovo untuk mencapai kemerdekaanya benar-benar relevan terhadap 4 (empat)

tingkat konstelasi keamanan Balkan, diantaranya adalah negara-negara yang berada di dalam kawasan dalam negeri, hubungan negara-ke negara, interaksi wilayah dengan daerah-daerah tetangga, dan peran kekuatan besar di dalam kawasan (Adrian, 2013). Dengan demikian konflik Kosovo tidak hanya relevan terhadap manajemen internasional dari konflik etno-politik, tetapi juga sebagai efek yang mana dihasilkan di dalam ruang pasca-Yugoslavia (yang mana merupakan konsekuensi dari fitur ketergantungan keamanan daripada *RSC*) dan di luar hal tersebut yaitu di ruang pasca-Soviet (yang merupakan konsekuensi interdependensi antar regional antara dua sub-kompleks termasuk dua kompleksitas keamanan yang bersebelahan). Permasalahan keamanan Eropa di era globalisasi mulai diartikulasikan secara bertahap dengan lebih baik, juga ditingkat regional, sebagaimana pada tingkat global. Di tingkat Eropa saat ini sedang membahas keberadaan kompleks keamanan regional, kompleks keamanan Uni Eropa yang dominan dan kompleks keamanan yang berpusat di Federasi Rusia (Diez, Stetter, & Albert, 2006).

Titik kunci di sini adalah pengaruh kekuatan luar pada pemisahan. Faktor eksternal sedang dimainkan ketika tampaknya dinamika sepenuhnya didorong secara internal. Selama periode tanpa adanya aktor eksternal (dimulai dari pecahnya upaya pertama *EC (European Commission)* dalam mediasi pada tahun 1991 hingga pemboman NATO dan peristiwa Dayton pada tahun 1995), inisiatif ini berasal dari lokal aktor, sementara kekuatan eksternal kebanyakan di representasikan oleh UN (Mandelbaum, 1999). Faktor kuncinya disini adalah ekspektasi para aktor di wilayah tersebut terhadap bagaimana kekuatan besar akan bereaksi. Dengan demikian, daerah tersebut tidak dikendalikan oleh sistem sebagai daerah yang terisolasi. Permasalahan tersebut rupanya telah diselesaikan sejak lama (meskipun tidak terlalu berbeda) jika kawasan itu sepenuhnya tertutup. Maka, logika militer-politik klasik akan mengarahkan aktor-aktor untuk mempertimbangkan kemungkinan akan terjadinya sesuatu, mungkin ke arah yang lebih realistis, dan berusaha untuk melakukan kompromi ketika mereka tidak memiliki harapan untuk memperbaiki situasi perang. Namun, karena masing-masing aktor utama memiliki aliansi kuat dari pihak eksternal, mereka akan terus berharap untuk mendapatkan dukungan, dan

itu cenderung membuat mereka kurang puas. Orang-orang Kroasia mendengar suara-suara pendukung dari Jerman sejak awal dan mempercayai hal ini akan menjamin mereka untuk mendapatkan dukungan dari pihak UE ataupun NATO, Serbia mengharapkan dukungan dari Rusia, sedangkan kaum Muslim seringkali memiliki kesan bahwa Amerika telah memutuskan untuk datang membantu mereka, dan oleh sebab itu mereka tidak berkompromi meskipun berada di dalam kondisi terlemahnya (Kumar, 2008).

Rencana Vance-Owen yang dilatar belakangi oleh perang Bosnia pada tahun 1993 kemungkinan gagal terutama dikarenakan suara-suara di Amerika Serikat, di kongres, sebanyak dari administrasinya memberikan motivasi bagi Muslim Bosnia untuk membatalkan perjanjian (Eyal, 1993). Begitu juga Serbia yang sering diberikan harapan palsu dengan mendengarkan pihak Rusia yang menolak daripada pihak yang lebih memiliki otoritas. Dengan demikian perbedaan antara kekuatan-kekuatan eksternal tidak pernah meningkat/tereskalasi ke dalam intervensi yang lebih kompetitif yang ditakutkan pada beberapa poin, namun masih mempersulit solusi-solusi dengan diantisipasi di dalam wilayah tersebut. Demikian pula pemberontakan oleh gerakan gerilya Kosovo-Albania KLA yang bertujuan untuk menarik keterlibatan pihak eksternal yang kemudian strategi ini dibuktikan dengan serangan udara oleh NATO pada tahun 1999 terhadap Yugoslavia dan tekanan pihak Barat termasuk UE untuk penyelesaian baik sebelum maupun sesudah.

